



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR HK.02.02.8C.12.25.0371 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Belitung tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Belitung dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Belitung.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belitung
pada tanggal 05 Desember 2025
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG,



ASRUDDIN

Kata Pengantar



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Belitung Tahun 2025–2029 dapat disusun. Renstra ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, serta program pengawasan Obat dan Makanan, agar pelaksanaan tugas Loka POM di Kabupaten Belitung berjalan terarah, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan Masya-

rakat dan dinamika daerah. Sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang berada di wilayah kepulauan dengan aktivitas ekonomi sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM pangan yang pesat, Loka POM di Kabupaten Belitung menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks. Selain fokus pada pengawasan premarket, postmarket, penguatan laboratorium, penindakan, serta edukasi dan pembinaan pelaku usaha, Renstra ini juga merespons kebijakan nasional terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada peningkatan kebutuhan akan produk pangan yang aman, bergizi, dan berkualitas. Loka POM di Kabupaten Belitung berperan penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut melalui pengawalan keamanan pangan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal agar mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan. Selama periode 2020–2024, Loka POM telah mencatat capaian positif dalam peningkatan mutu produk, efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pelayanan publik, serta penguatan tata kelola organisasi dan kompetensi SDM. Namun, keterbatasan sarana laboratorium, kapasitas pengawasan, dan karakteristik wilayah kepulauan tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, Renstra ini dirancang berdasarkan evaluasi kinerja, aspirasi pemangku kepentingan, serta isu strategis nasional, termasuk transformasi digital, pemberdayaan UMKM, dan penguatan sistem kesehatan masyarakat.

Melalui Renstra 2025–2029, Loka POM di Kabupaten Belitung berkomitmen memperkuat penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan secara adaptif, berbasis risiko, dan kolaboratif. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung perlindungan kesehatan masyarakat, keberhasilan Program MBG, peningkatan daya saing pelaku usaha, serta kontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. Dengan penguatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi, dan sinergi lintas sektor,

Loka POM berupaya menghadirkan layanan pengawasan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada manfaat publik.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2025–2029 menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional.

Belitung, 07 Desember 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Belitung

Asruddin, S.Farm., Apt., M.K.M

Daftar Isi

Kata Pengantar..... *i*

Daftar Isi..... *iii*

Daftar Tabel..... *iv*

Daftar Gambar *v*

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

 1.1 KONDISI UMUM 1

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS..... **54**

 2.1 VISI 54

 2.2 MISI..... 56

 2.3 TUJUAN 58

 2.4 SASARAN KEGIATAN..... 61

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI **73**

 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM 73

 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG 76

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... **87**

 4.1 TARGET KINERJA 87

 4.2 KERANGKA PENDANAAN 92

BAB V PENUTUP..... **94**

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung 2020-2024..... 5

Tabel 1. 2 Tabel Sarana yang diperiksa Tahun 2024 47

Tabel 1. 3 Matriks Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Belitung 52

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029.....59

Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi
UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten
Belitung periode 2025-2029 65

Tabel 2. 3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Belitung 69

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan BPOM dan Strategi Loka POM di Kabupaten Belitung..80

Tabel 4. 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung 2025-
2029.....87

Tabel 4. 2 Kebutuhan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Belitung 2025-2029
Berdasarkan Kegiatan..... 92

Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Belitung 2025-2029 Berdasarkan
Sumber Dana 92

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Belitung	3
Gambar 1. 2 Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024	10
Gambar 1. 3 Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024	11
Gambar 1. 4 Capaian Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024.....	12
Gambar 1. 5 Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan	13
Gambar 1. 6 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT Tahun 2020-2024	14
Gambar 1. 7 Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2020-2024.....	15
Gambar 1. 8 Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti	16
Gambar 1. 9 Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat	17
Gambar 1. 10 Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi	18
Gambar 1. 11 Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan	19
Gambar 1. 12 Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar Tahun 2020-2024	20
Gambar 1. 13 Capaian Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan	20
Gambar 1. 14 Capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.....	22
Gambar 1. 15 Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai.....	23
Gambar 1. 16 Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa	24
Gambar 1. 17 Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang	25
Gambar 1. 18 Capaian Persentase implementasi rencana aksi Reformasi.....	26
Gambar 1. 19 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan.....	27
Gambar 1. 20 Capaian Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi	28
Gambar 1. 21 Capaian Nilai AKIP Tahun 2020-2024	28
Gambar 1. 22 Capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2020-2024	29
Gambar 1. 23 Capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2020-2024.....	30
Gambar 1. 24 Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten	31
Gambar 1. 25 Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Tahun 2020-2024.....	32
Gambar 1. 26 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024 .	33
Gambar 1. 27 Capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2024	33
Gambar 1. 28 Capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2020-2024	34
Gambar 1. 29 Capaian Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Tahun 2020-2024 ...	35
Gambar 1. 30 Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan pada Loka POM di Kabupaten Belitung.....	39
Gambar 1. 31 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Loka POM di KABUPATEN Belitung ...	41
Gambar 1. 32 Piagam Penghargaan dari BPOM Pusat terkait Arsip.....	43
Gambar 1. 33 Grafik Usia dan Jenis Kelamin pengguna Sosial media Tahun 2024	46
Gambar 2. 1 Misi Presiden (Asta Cita).....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sebagai perpanjangan tangan BPOM di daerah, Loka POM di Kabupaten Belitung berperan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPOM di wilayah Kabupaten Belitung dan sekitarnya. Dasar hukum penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025.

Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki tugas melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, serta Pangan Olahan, melalui kegiatan pengawasan pre-market dan post-market, pemberdayaan masyarakat, pelayanan informasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Loka POM di Kabupaten Belitung didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain gedung kantor operasional, kendaraan dinas untuk mobilitas kegiatan pengawasan dan pelayanan, perangkat komputer dan sistem informasi pengawasan, serta ruang pelayanan publik yang representatif. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut terus ditingkatkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan serta kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

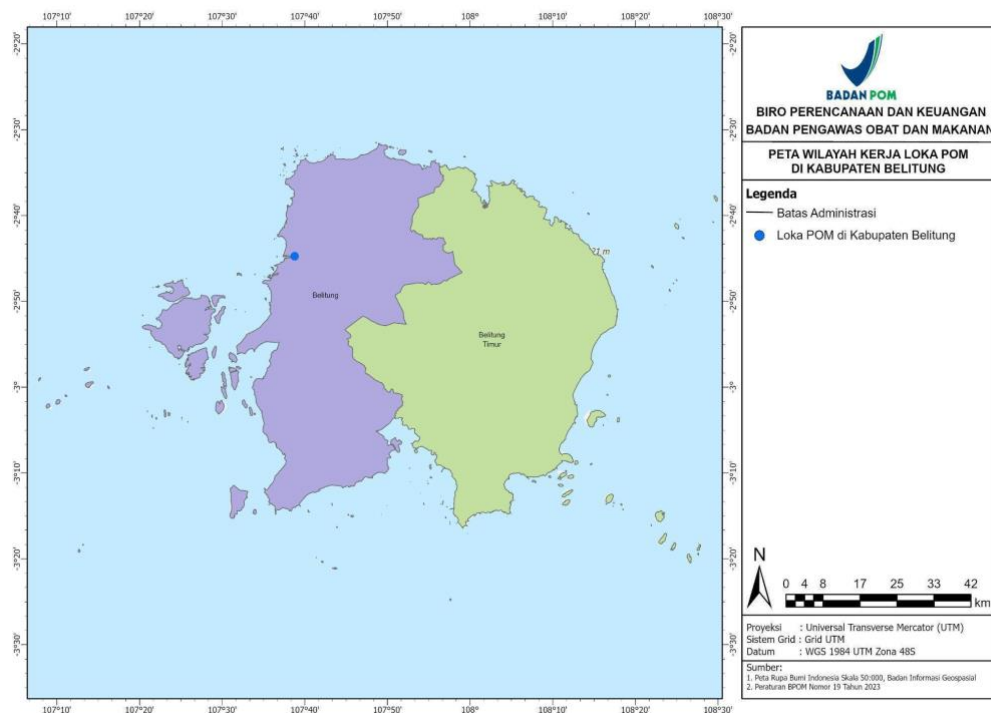
Selain itu, Loka POM di Kabupaten Belitung berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan PUGIS dilakukan melalui penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, penyusunan program yang responsif gender, serta pemberdayaan masyarakat tanpa diskriminasi, guna memastikan manfaat pengawasan Obat dan Makanan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana yang terus ditingkatkan, serta penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas, Loka POM di Kabupaten Belitung berupaya mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan berdaya guna di wilayah kerjanya.

Loka POM di Kabupaten Belitung sesuai tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menyediakan arah dan panduan dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah Pulau Belitung selama lima tahun ke depan. Dengan Renstra ini, diharapkan Loka POM Kabupaten Belitung dapat menjalankan tugasnya secara lebih terencana, terukur, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan dan tantangan lokal selama periode 2025-2029.

Kabupaten Belitung merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari dua kecamatan utama dengan total luas wilayah sekitar 2.293 km². Posisi geografisnya yang strategis sebagai penghubung antara Pulau Sumatra dan Kalimantan menjadikannya salah satu daerah transit penting dalam distribusi obat dan makanan. Penduduk Kabupaten Belitung diperkirakan mencapai 190.000 jiwa pada tahun 2025, dengan komposisi ekonomi yang didominasi oleh sektor pariwisata, perikanan, dan perdagangan. Keberadaan pasar tradisional, swalayan, serta fasilitas pariwisata yang meningkat menambah kompleksitas pengawasan produk di wilayah ini.

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Belitung adalah unit kerja di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di wilayah Pulau Belitung. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Belitong

Loka POM di Kabupaten Belitong berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dengan memastikan hanya produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat yang beredar di wilayah Pulau Belitong. Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

a) Tugas Loka POM

Loka POM di Kabupaten Belitong mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b) Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitong

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

I.1.1 Capaian Kinerja Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung 2020-2024

Capaian sasaran kegiatan dan indikator kegiatan Loka POM di Kabupaten Belitung periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT															
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	68,54	84,83	83,60	64,66	77,34	86,60	82,76	95,57	90,00	86,61	96,23	92,00	97,32	105,78
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	26,67	34,19	80,00	86,11	107,64	82,00	94,59	115,35	84,00	91,89	109,39	92,00	94,00	102,17
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	62,07	79,58	80,00	64,29	80,36	82,00	58,70	71,59	84,00	79,55	94,70	80,00	84,09	105,11
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00	62,50	89,29	72,00	93,75	130,21	74,00	78,26	105,76	76,00	78,57	103,38	79,00	91,67	116,04
SK 2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan															
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,25	88,72	101,68
SK 3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT															
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	90,00	106,64	118,49	100,00	84,63	84,63	100,00	96,10	96,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
	inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan															
7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,00	21,16	38,47	50,00	67,61	135,22	55,00	71,14	129,35	60,00	67,86	113,10	69,50	77,90	112,09
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87,00	33,33	38,31	88,00	100,00	113,64	90,00	100,00	111,11	91,00	100,00	109,89	100,00	100	100
9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	8,00	17,39	50,00	60,00	120,00	55,00	62,16	113,02	60,00	62,16	103,60	65,00	68,42	105,26
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	26,06	47,38	60,00	44,77	74,62	63,00	64,33	102,11	66,00	66,31	100,47	68,00	69,04	101,53
11	Persentase UMKM yang memenuhi standar	-	-	-	-	-	-	77,00	80,00	103,90	79,00	80,00	101,27	81,00	100,00	123,46
12	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	100,00	105,26
SK 4	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
13	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,89	90,89	101,11	91,50	92,53	101,13	92,40	92,70	100,32	93,30	93,83	100,57	94,70	95,31	100,64

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK 5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
14	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,63	101,26	50,00	60,00	120,00	50,00	60,00	120,00
15	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	50,00	53,00	106,00	50,00	60,00	120,00	50,00	60,00	120,00	50,00	60,00	120,00
SK 6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT															
16	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45,00	0,00	0,00	50,00	70,00	140,00	60,00	100,00	166,67	69,00	100,00	144,93	85,00	100,00	117,65
SK 7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal															
17	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
20	Nilai AKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,20	75,00	91,24	74,29	74,70	100,55
21	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,21	91,88	101,85
SK 8	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal															
22	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77,00	85,29	110,77	85,30	85,36	100,07	85,40	85,50	100,12	85,50	89,35	104,50	89,55	85,5	95,48
SK 9	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan															
23	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal	-	-	-	-	-	-	2,25	2,50	111,11	2,50	3,00	120,00	3,00	3,60	120,00
SK 10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel															
24	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90,00	75,00	83,33	95,00	100,00	105,26	90,60	91,04	100,49	91,80	90,24	98,30	-	-	-
25	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,29	92,28	102,20
26	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,34	95,00	104,01

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
27	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	93,18	116,48
28	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	99,82	166,37

Selama 5 (Lima) tahun terakhir, nilai kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, Loka POM di Kabupaten Belitung selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya.

Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki 10 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja selama periode renstra 2020-2024. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

Sasaran ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari risiko yang disebabkan oleh penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, seperti kontaminasi bahan berbahaya, produk palsu, atau produk kadaluarsa. Sasaran strategis ini memiliki 4 indikator kinerja yaitu:

(1) Persentase Obat yang memenuhi syarat.

Pada tahun 2020, indikator *Persentase Obat yang Memenuhi Syarat* memiliki target sebesar 80,80, dengan realisasi 68,54%, sehingga menghasilkan capaian 84,83% yang menunjukkan bahwa pengawasan obat masih perlu diperkuat untuk mencapai target sepenuhnya. Pada tahun 2021, capaian menurun menjadi 77,34%, menggambarkan adanya tantangan dalam menjaga mutu obat yang beredar. Namun pada tahun 2022, capaian meningkat signifikan menjadi 95,57%, menandakan perbaikan efektivitas pengawasan dan kepatuhan sarana. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 96,23%, mencerminkan kinerja pengawasan yang semakin stabil.



Gambar 1. 2 Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Puncak peningkatan terjadi pada tahun 2024, dimana capaian mencapai 105,78%, melampaui target dan menunjukkan kualitas pengawasan yang

sangat optimal serta semakin tingginya kepatuhan terhadap standar mutu obat.

(2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Pada tahun 2020, indikator *Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat* memiliki target 78, dengan realisasi 26,67%, sehingga capaian hanya mencapai 34,19%, menunjukkan bahwa pengawasan mutu pangan masih sangat perlu diperkuat. Memasuki tahun 2021, terjadi peningkatan kinerja yang sangat signifikan, ditunjukkan oleh capaian 107,64%, melampaui target yang telah ditetapkan. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2022, dengan capaian meningkat menjadi 115,35%, yang menggambarkan efektivitas pengawasan serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang makanan. Pada tahun 2023, capaian kembali berada pada level tinggi yakni 109,39%, menunjukkan bahwa kinerja pengawasan pangan berlangsung konsisten dan stabil.



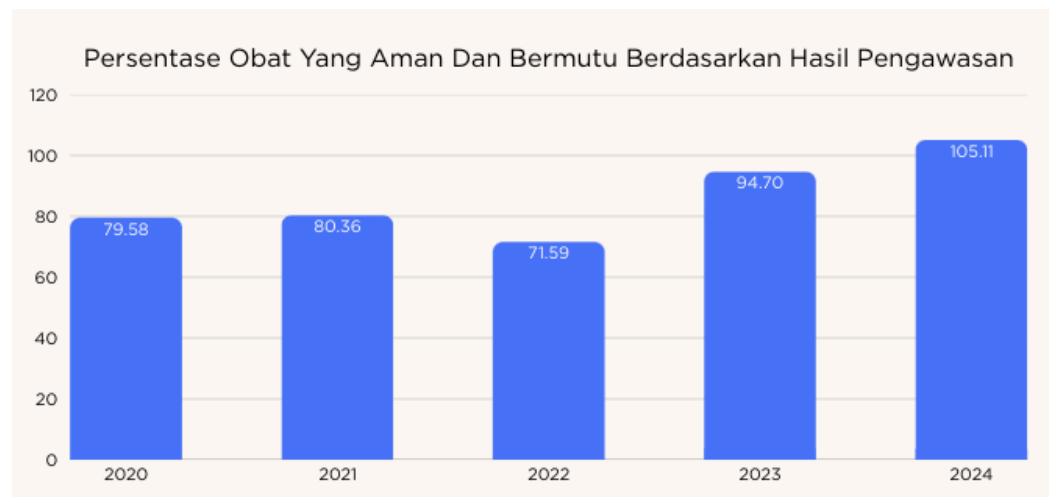
Gambar 1. 3 Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Tahun 2020-2024

Puncaknya, pada tahun 2024, indikator ini kembali berhasil melampaui target dengan capaian 102,17%, mengindikasikan bahwa pengawasan mutu pangan telah berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan keamanan pangan di wilayah pengawasan.

(3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Pada tahun 2020, indikator *Persentase Obat yang Aman dan Bermutu* ditetapkan dengan target 78,00%, dengan realisasi 62,07%, sehingga capaian mencapai 79,58%, yang menunjukkan bahwa pengawasan obat masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target secara optimal. Pada

tahun 2021, capaian sedikit meningkat menjadi 80,36%, mencerminkan adanya perbaikan meskipun peningkatannya belum signifikan. Namun, pada tahun 2022, capaian turun menjadi 71,59%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kestabilan mutu obat dan efektivitas pengawasan pada tahun tersebut. Pada tahun 2023, kinerja kembali menunjukkan perbaikan dengan capaian 94,70%, menandakan peningkatan efektivitas pengawasan serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu obat.



Gambar 1. 4 Capaian Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana capaian mencapai 105,11%, melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan bahwa pengawasan obat telah berjalan sangat optimal serta memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

(4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Pada tahun 2020, indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu memiliki target 70,00%, dengan realisasi 62,50%, sehingga capaian mencapai 89,29%, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pangan sudah cukup baik namun masih memerlukan penguatan agar dapat memenuhi target secara penuh. Memasuki tahun 2021, kinerja meningkat sangat signifikan dengan capaian 130,21%, menunjukkan efektivitas pengawasan serta tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan. Pada tahun 2022, capaian kembali berada pada level tinggi yakni 105,76%, menandakan bahwa pengawasan pangan tetap efektif dan konsisten. Tren positif ini

berlanjut pada tahun 2023, dengan capaian 103,38%, yang menunjukkan stabilitas kinerja pengawasan dan peningkatan mutu pangan yang beredar.



Gambar 1. 5 Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024

Puncaknya pada tahun 2024, capaian mencapai 116,04%, kembali melampaui target yang ditetapkan dan mencerminkan bahwa sistem pengawasan pangan telah berjalan sangat optimal, dengan tingkat kepatuhan sarana yang semakin baik dalam memastikan keamanan dan mutu produk pangan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS1 yaitu: (a) melakukan komunikasi dengan pihak balai penguji terkait pengumpulan hasil uji serta melakukan monev; (b) Melakukan sampling dan penandaan label sesuai dengan pedoman sampling; (c) melaksanakan sampling dan evaluasi label serta pengiriman sampel tepat waktu; dan (d) Penyesuaian kegiatan agar target kinerja di Tahun 2024 dapat tercapai.

2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran strategis ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap peran Loka POM dalam melindungi masyarakat dari risiko produk yang tidak aman. Masyarakat diberikan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait keamanan

obat dan makanan, serta difasilitasi dalam menyampaikan keluhan atau laporan melalui kanal komunikasi yang transparan, seperti aplikasi pengaduan online atau media sosial. Sasaran strategis ini diukur oleh 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT.



Gambar 1. 6 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT Tahun 2020-2024

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT mulai diterapkan pada tahun 2024, sehingga pada periode 2020–2023 belum terdapat target maupun pengukuran untuk sasaran ini. Pada tahun pertama penerapannya tersebut, ditetapkan target sebesar 87,25, dengan realisasi mencapai 88,72, sehingga capaian kinerja mencapai 101,68%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas layanan publik yang diberikan oleh UPT telah berada pada level yang sangat baik, bahkan melampaui ekspektasi yang ditetapkan. Capaian ini sekaligus menjadi indikator positif bahwa masyarakat merasakan manfaat, kemudahan, serta kepuasan terhadap layanan yang diselenggarakan, dan menjadi dasar bagi UPT untuk terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan di tahun-tahun berikutnya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS2 yaitu : (a) memastikan bahwa informasi terkait pengawasan obat dan makanan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat; (b) memastikan pengaduan dan keluhan masyarakat terkait obat dan makanan diproses

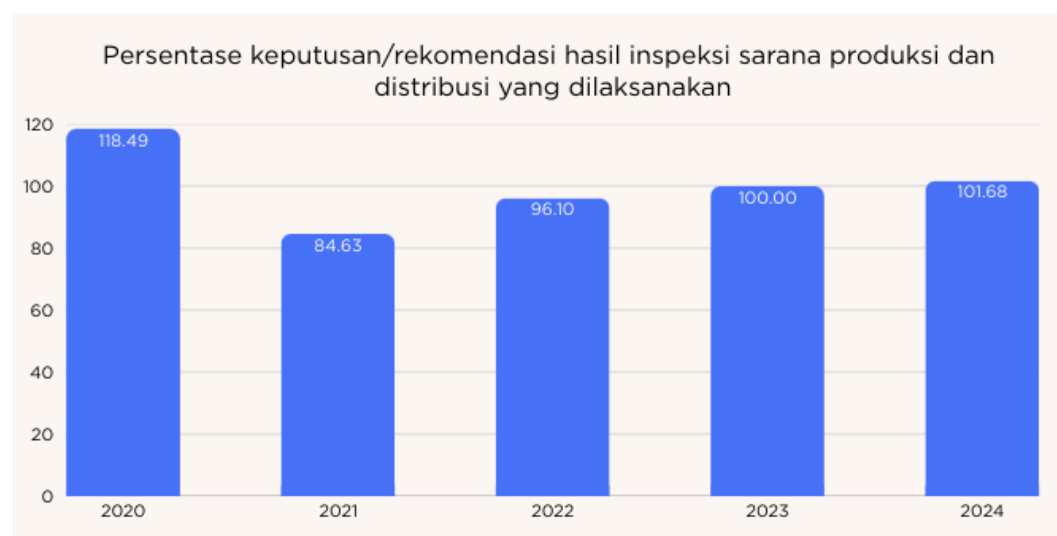
dengan cepat dan transparan; (c) melakukan evaluasi terhadap layanan publik yang diberikan dengan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan pelaku usaha.

3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi, dan penjualan obat serta makanan berjalan secara lebih efisien dan memberikan dampak yang nyata terhadap kualitas produk yang beredar di masyarakat. Sasaran strategis ini diukur oleh 7 indikator kinerja, yaitu:

(1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan;

Pada tahun 2020, indikator *Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan* memiliki target 90,00%, dengan realisasi 106,64%, sehingga capaian mencapai 118,49%, menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil inspeksi terlaksana dengan sangat baik dan melampaui target. Namun pada tahun 2021, capaian menurun menjadi 84,63%, lebih rendah dari target 100%, yang mengindikasikan perlunya penguatan dalam proses tindak lanjut hasil inspeksi. Kinerja mulai membaik pada tahun 2022 dengan capaian 96,10%, meskipun masih sedikit di bawah target. Pada tahun 2023, indikator ini mencapai 100,00%, menandakan bahwa seluruh rekomendasi hasil inspeksi telah ditindaklanjuti secara optimal.



Gambar 1. 7 Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana

Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2020-2024

Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, di mana capaian kembali berada pada 100%, menunjukkan stabilitas dan konsistensi tinggi dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi dari tahun ke tahun.

(2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;

Pada tahun 2020, indikator *Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan* memiliki target 55,00%, dengan realisasi 21,16%, sehingga capaian hanya mencapai 38,47%, menunjukkan bahwa tingkat tindak lanjut oleh pemangku kepentingan masih rendah dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Kinerja meningkat drastis pada tahun 2021, dengan capaian mencapai 135,22%, menandakan adanya perbaikan signifikan dalam respons dan komitmen pemangku kepentingan terhadap rekomendasi pengawasan. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, dengan capaian 129,35%, yang mencerminkan konsistensi dalam peningkatan penanganan tindak lanjut hasil inspeksi. Pada tahun 2023, capaian kembali tinggi yaitu 113,10%, menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara efektif.



Gambar 1. 8 Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020-2024

Peningkatan kinerja ini terus berlanjut pada tahun 2024, dengan capaian 112,09%, sehingga dapat disimpulkan bahwa selama empat tahun

terakhir terjadi peningkatan dan stabilitas yang kuat dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi oleh pemangku kepentingan.

(3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;

Pada tahun 2020, indikator *Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu* memiliki target 87,00%, namun realisasi hanya mencapai 33,33%, sehingga capaian berada pada 38,31%, menunjukkan bahwa proses penyelesaian sertifikasi masih belum optimal dan memerlukan peningkatan signifikan. Memasuki tahun 2021, kinerja meningkat tajam dengan capaian 113,64%, menandakan bahwa keputusan penilaian sertifikasi mulai dapat diselesaikan tepat waktu bahkan melampaui target. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2022, dengan capaian 111,11%, mengindikasikan konsistensi dalam ketepatan waktu penyelesaian sertifikasi. Pada tahun 2023, capaian kembali tinggi sebesar 109,89%, menunjukkan bahwa pelayanan sertifikasi berjalan semakin efektif dan responsif.



Gambar 1. 9 Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020-2024.

Puncaknya pada tahun 2024, seluruh keputusan penilaian sertifikasi berhasil diselesaikan tepat waktu dengan capaian 100%, yang menegaskan stabilitas dan kematangan proses penyelesaian sertifikasi dari tahun ke tahun.

(4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;

Pada tahun 2020, indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan memiliki target 46,00%, dengan realisasi 8,00%, sehingga capaian hanya mencapai 17,39%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sarana produksi masih sangat rendah dan memerlukan penguatan pembinaan serta pengawasan. Pada tahun 2021, kinerja meningkat signifikan dengan capaian mencapai 120,00%, hasil dari realisasi yang naik drastis menjadi 60,00%, sehingga melewati target yang ditetapkan. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 113,02%, mencerminkan adanya konsistensi perbaikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, capaian tetap berada pada tingkat yang tinggi yaitu 103,60%, meskipun peningkatannya tidak sebesar tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan efektivitas pengawasan yang stabil.



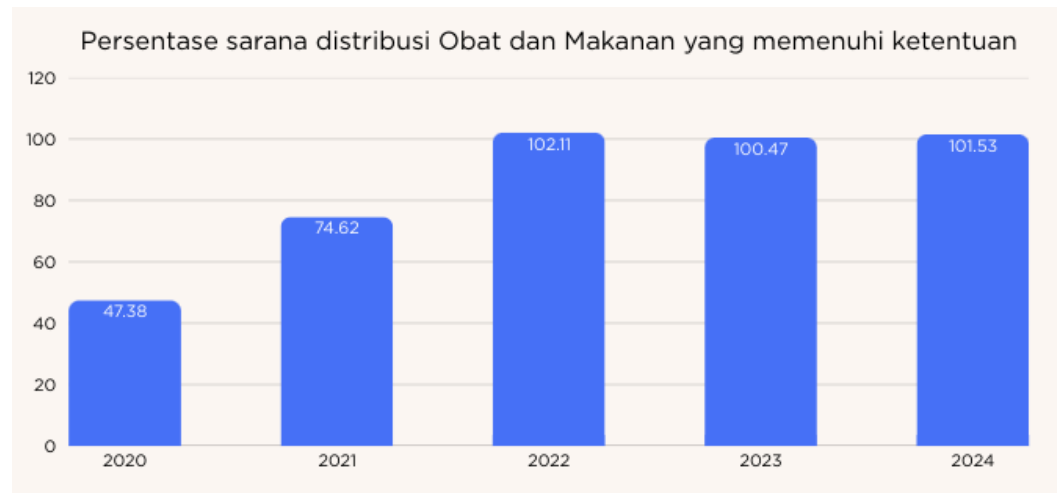
Gambar 1. 10 Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020-2024.

Tren positif ini kembali terlihat pada tahun 2024, dengan capaian 105,26% yang menggambarkan bahwa sarana produksi semakin mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan yang berkelanjutan dalam tingkat kepatuhan sarana produksi Obat dan Makanan, terutama setelah tahun 2020, yang menunjukkan keberhasilan upaya pembinaan dan pengawasan.

(5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;

Pada tahun 2020, capaian indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan hanya mencapai 47,38%, jauh

di bawah target. Kinerja mulai membaik pada 2021 dengan capaian 74,62%, meskipun masih belum memenuhi target. Perbaikan signifikan terjadi pada 2022 dengan capaian 102,11% yang melampaui target, dan tren positif ini terus berlanjut pada 2023 dengan capaian 100,47%.

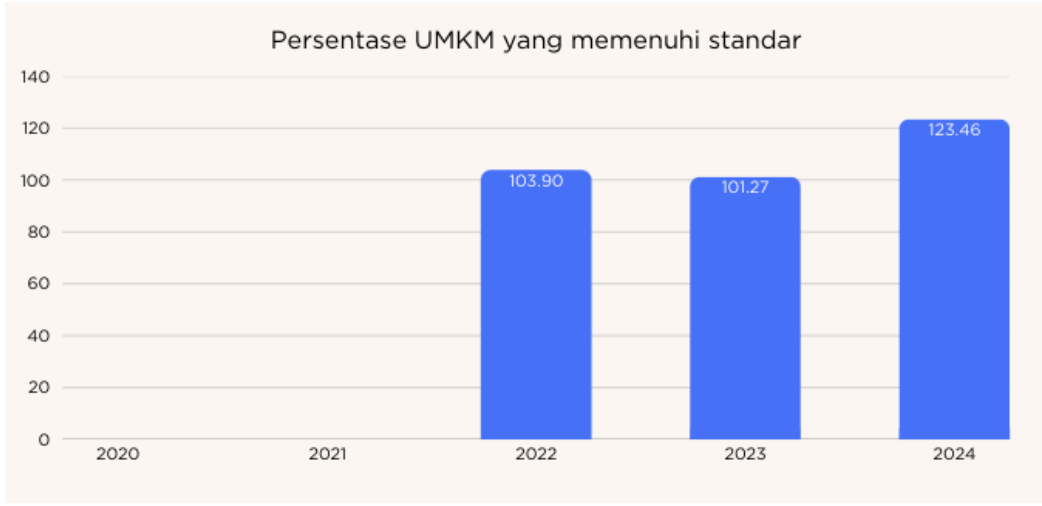


Gambar 1. 11 Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020-2024.

Pada 2024, capaian kembali meningkat menjadi 101,53%. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan konsisten dari tahun ke tahun, dengan tiga tahun terakhir berhasil mencapai target yang ditetapkan.

(6) Persentase UMKM yang memenuhi standar.

Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar mulai diterapkan pada tahun 2022, karena pada tahun 2020 dan 2021 sasaran ini belum ditetapkan. Pada tahun 2022, capaian mencapai 103,90%, menunjukkan bahwa realisasi (80,00%) telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, kinerja tetap baik dengan capaian 101,27%, menandakan bahwa sebagian besar UMKM yang dibina telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.



Gambar 1. 12 Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar Tahun 2020-2024

Tren positif semakin kuat pada tahun 2024 dengan capaian 123,46%, menunjukkan peningkatan signifikan dan keberhasilan program pembinaan UMKM dalam mencapai standar keamanan dan mutu.

(7) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi, Makanan, Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota mulai ditetapkan pada tahun 2024, karena pada periode 2020–2023 indikator ini belum memiliki target.



Gambar 1. 13 Capaian Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, UPT berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi mencapai 100,00% dari target 95,00%, sehingga menghasilkan capaian sebesar 105,26%. Hal ini menunjukkan bahwa UPT mampu berperan aktif dan optimal dalam berbagai program lintas sektor yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS3 yaitu (a) berkoordinasi dengan PIC Pusat dan memanfaatkan database pada masing-masing ke deputian; (b) Disiplin dalam menindaklanjuti hasil inspeksi sesuai timeline yang ditetapkan; (c) Melakukan pelaporan hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi dari Pusat secara konsisten dan melakukan monev; (d) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap permintaan CAPA; (e) Koordinasi dengan lintas sektor (misalnya Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha PIRT); (f) memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan cara produksi yang baik maupun proses pendaftaran produk; (g) melaksanakan kegiatan pengawasan sarana produksi sesuai dengan perencanaan dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan pedoman yang berlaku; (h) Koordinasi dengan OPD di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

4. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan yang beredar di pasar. Sasaran ini diukur oleh 1 indikator kinerja, yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.

Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan menunjukkan tren kinerja yang stabil dan konsisten melampaui target sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian mencapai 101,11%, dengan realisasi sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Kinerja positif ini berlanjut pada tahun 2021 dengan capaian 101,13%, mencerminkan peningkatan kualitas pembinaan UMKM. Pada tahun 2022, capaian tetap tinggi yaitu 100,32%, menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM mampu mempertahankan pemenuhan standar.



Gambar 1. 14 Capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Tren stabil berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 100,57%, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 dengan capaian 100,64%. Secara keseluruhan, indikator ini menggambarkan pencapaian yang sangat baik dan konsisten, menandakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM telah berjalan efektif dari tahun ke tahun.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS4 yaitu (a) pengemasan kegiatan KIE semenarik mungkin; (b) Konten media sosial dibuat menarik dan menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat serta disesuaikan dengan agenda setting BPOM; (c) Sinergisme program KIE Obat dan Makanan dengan program lintas sektor terkait seperti Stunting; (d) melakukan beberapa KIE ke masyarakat dan salah satu program Bedulang “Bersama Desa Menanggulangi Penyalahgunaan Obat” selain ke masyarakat Loka POM di Kabupaten Belitung juga ke sekolah-sekolah di desa-desa yang menjadi target di Tahun 2024.

5. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Loka POM berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dalam pemeriksaan produk dan pengujian melalui penerapan teknologi terkini serta memperkuat kapasitas laboratorium pengujian. Sasaran strategis ini diukur oleh 2 indikator, yaitu

(1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar menunjukkan kinerja yang konsisten baik dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian berada pada tingkat 100,00%, dengan realisasi yang sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, capaian sedikit meningkat menjadi 101,26%, menandakan peningkatan efisiensi dalam pemeriksaan dan pengujian sampel obat. Kinerja meningkat signifikan pada tahun 2023 dengan capaian 120,00%, yang kembali dipertahankan pada tahun 2024 dengan capaian yang tetap tinggi yaitu 120,00%.



Gambar 1. 15 Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan tren peningkatan kualitas pengawasan, terutama pada dua tahun terakhir, yang mencerminkan kemampuan UPT dalam memastikan pemeriksaan dan pengujian obat berjalan sesuai standar yang berlaku.

(2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar menunjukkan kinerja yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian berada pada tingkat 100,00%, menandakan bahwa seluruh target pemeriksaan telah terpenuhi. Pada tahun 2021, capaian meningkat menjadi 106,00%, mencerminkan peningkatan kapasitas pemeriksaan dibandingkan target. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 120,00%, yang juga berhasil dipertahankan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing tetap berada pada tingkat 120,00%.



Gambar 1. 16 Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik serta stabilnya kemampuan UPT dalam memastikan sampel makanan diperiksa dan diuji sesuai standar yang berlaku.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS5 yaitu (a) Melakukan koordinasi dengan pihak pengujian agar pengujian sampel dapat dilakukan sesuai timeline dan hasil pengujian dapat diinput tepat waktu; (b) Sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat pada awal bulan dan segera mengirimkan ke balai pengujian; (c) Evaluasi penandaan/label melalui SIPT segera setelah melaksanakan sampling.

6. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan obat dan makanan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Sasaran strategis ini diukur oleh 1 indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan mulai diimplementasikan pada tahun 2021, karena pada tahun 2020 kegiatan penindakan belum dilaksanakan sehingga capaian tercatat 0,00%. Pada tahun 2021, kinerja meningkat sangat baik dengan capaian 140,00%, menunjukkan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian tertinggi mencapai 166,67%, mencerminkan keberhasilan yang signifikan dalam proses

penindakan. Pada tahun 2023, capaian tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi yaitu 144,93%, yang menandakan konsistensi kinerja.



Gambar 1. 17 Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, capaian masih berada pada kategori sangat baik yaitu 117,65%, menunjukkan bahwa keberhasilan penindakan terus terjaga meskipun tidak setinggi dua tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, indikator ini memperlihatkan peningkatan dan stabilitas yang kuat sejak mulai dilaksanakan pada tahun 2021.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS6 yaitu (a) Melakukan koordinasi dengan CJS (Criminal Justice System) di Kabupaten Belitung dalam penanganan perkara seperti dengan Korwas PPNS dan Kejaksaan; (b) Menindaklanjuti informasi dari Direktorat Intelijen Badan POM; (c) Koordinasi dengan lintas sektor seperti Bea Cukai, BNN Kabupaten Belitung

7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Unit Pelaksana Teknis (UPT), khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Loka POM berfokus pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk peningkatan sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, serta proses operasional yang lebih terstruktur dan terukur. Sasaran strategis ini diukur oleh 5 indikator kinerja yaitu (1) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT;

Indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

di Lingkup UPT menunjukkan kinerja yang sangat stabil dan optimal selama periode 2020 hingga 2024. Pada setiap tahunnya, baik target, realisasi, maupun capaian selalu berada pada angka 100,00%. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara penuh dan konsisten tanpa adanya penyimpangan atau penurunan kinerja.



Gambar 1. 18 Capaian Persentase implementasi rencana aksi Reformasi

Birokrasi di lingkup UPT Tahun 2020-2024

Konsistensi ini menunjukkan komitmen kuat UPT dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel selama lima tahun berturut-turut.

- (2) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu;
Indikator Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2020 dan 2021, dengan target, realisasi, dan capaian yang seluruhnya mencapai 100,00%. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh dokumen ketatausahaan berhasil disampaikan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan selama dua tahun tersebut.



*Gambar 1. 19 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan
tepat waktu Tahun 2020-2024*

Mulai tahun 2022 hingga 2024, indikator ini tidak lagi digunakan sebagai bagian dari penilaian kinerja, sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada periode tersebut.

(3) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu;

Indikator Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu menunjukkan kinerja yang konsisten optimal selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2020, 2021, dan 2022, target, realisasi, serta capaian seluruhnya mencapai 100,00%, yang menandakan bahwa penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan rencana aksinya selalu dilakukan tepat waktu tanpa kendala.



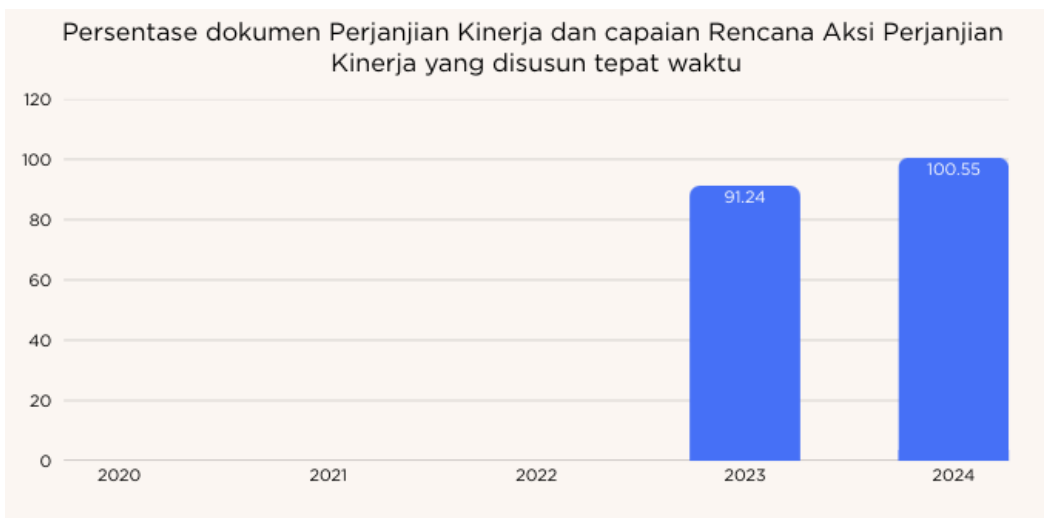
Gambar 1. 20 Capaian Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi

Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Tahun 2020-2024

Mulai tahun 2023 hingga 2024, indikator ini tidak lagi digunakan sebagai bagian dari pengukuran kinerja, sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada periode tersebut.

(4) Nilai AKIP;

Indikator Nilai AKIP mulai muncul dan diukur pada tahun 2023, karena pada periode 2020–2022 indikator ini belum ditetapkan sebagai IKU. Pada tahun 2023, capaian mencapai 91,24%, dengan realisasi sebesar 75,00 dari target 82,20, menunjukkan bahwa meskipun belum memenuhi target secara penuh, tingkat pencapaian masih berada pada kategori baik.



Gambar 1. 21 Capaian Nilai AKIP Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, kinerja meningkat signifikan dengan capaian 100,55%, ditunjang oleh realisasi 74,70 yang berhasil melampaui target 74,29. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja UPT dari tahun sebelumnya.

(5) Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan mulai ditetapkan sebagai IKU pada tahun 2024, karena pada periode 2020–2023 indikator ini belum masuk dalam pengukuran kinerja UPT.



Gambar 1. 22 Capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2020-2024

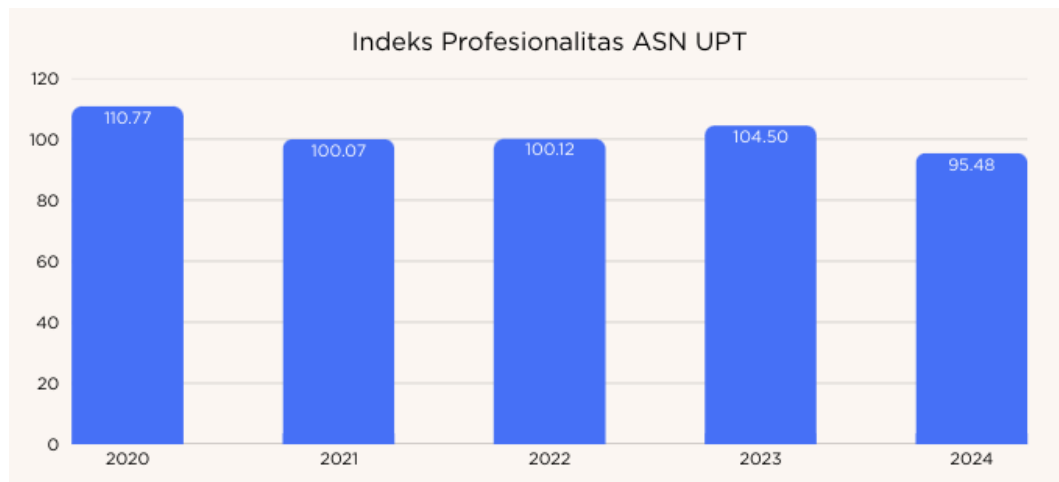
Pada tahun 2024, kinerja pengelolaan kearsipan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi 91,88 yang melampaui target 90,21, sehingga menghasilkan capaian sebesar 101,85%. Capaian ini mencerminkan bahwa tata kelola kearsipan di UPT telah berjalan efektif, tertib, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS7 yaitu (a) Melakukan program kerja dan monev kegiatan pada setiap pokja agar terlaksana; (b) melaporkan dokumen ketatausahaan secara tepat waktu; (c) Melaksanakan pelaporan kinerja setiap bulan maupun triwulan secara tepat waktu; (d) Pengelolaan arsip sesuai dengan prosedur penyelenggaraan kearsipan.

8. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan lebih efektif, efisien, dan

profesional. Sasaran strategis ini diukur oleh 1 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas ASN UPT. Indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT menunjukkan perkembangan kinerja yang cukup stabil sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian mencapai 110,77%, dengan realisasi yang melampaui target secara signifikan. Pada tahun 2021, capaian berada pada tingkat 100,07%, mencerminkan bahwa profesionalitas ASN tetap terjaga sesuai target. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 100,12%, menunjukkan konsistensi dalam pemenuhan standar profesionalitas.



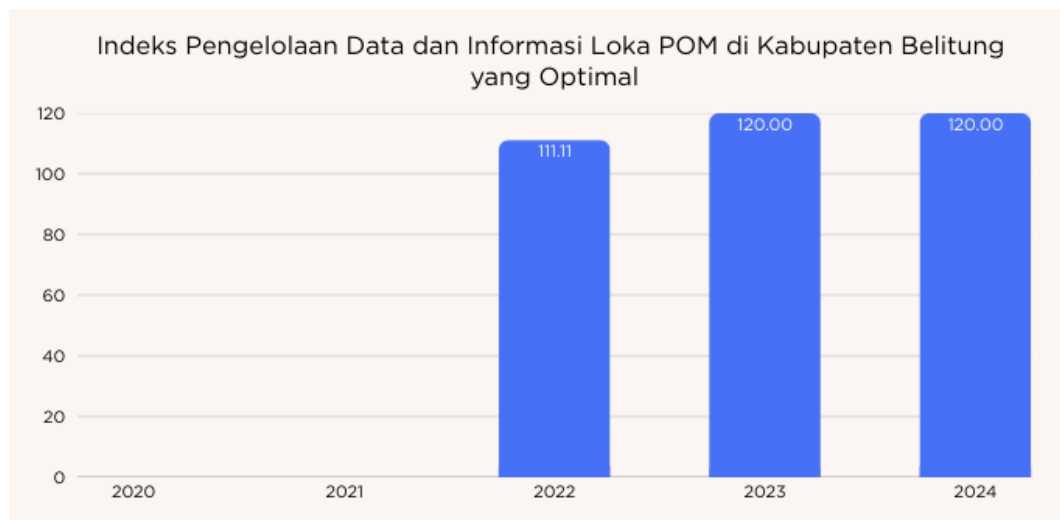
Gambar 1. 23 Capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2020-2024

Tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang lebih baik, dengan capaian mencapai 104,50%, menandakan adanya peningkatan kemampuan dan kualitas kinerja ASN. Namun pada tahun 2024, capaian sedikit menurun menjadi 95,48%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS8 yaitu meningkatkan kompetensi pegawai untuk mendukung isu-isu terkait pengawasan Obat dan Makanan yang berkembang baik pelatihan teknis maupun manajerial terkait administrasi. Peningkatan kompetensi dilakukan dengan mengikuti pelatihan program diklat/bimtek/sosialisasi/ seminar yang dilakukan oleh unit pusat secara langsung ataupun dengan memanfaatkan sumber-sumber yang telah disiapkan seperti Ideas serta dengan mengikuti pelatihan eksternal.

9. Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas laboratorium pengujian serta sistem pengelolaan data yang mendukung proses pengawasan obat dan makanan. Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal. Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal mulai diterapkan pada tahun 2022, karena pada tahun 2020 dan 2021 indikator ini belum ditetapkan sebagai IKU. Pada tahun 2022, capaian mencapai 111,11%, dengan realisasi 2,50 yang melampaui target 2,25, menunjukkan pengelolaan data dan informasi mulai berjalan efektif. Kinerja meningkat pada tahun 2023 dengan capaian 120,00%, seiring peningkatan realisasi menjadi 3,00 dari target 2,50.



Gambar 1. 24 Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Belitung yang Optimal Tahun 2020-2024

Tren positif ini kembali berlanjut pada tahun 2024, dengan capaian tetap tinggi sebesar 120,00% melalui realisasi 3,60 dari target 3,00. Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam kualitas pengelolaan data dan informasi di lingkungan Loka POM.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS9 yaitu Melakukan monitoring mingguan terhadap nilai yang bisa dilihat dari situs BCC Badan POM. Dengan adanya monitoring mingguan diharapkan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung bisa secara rutin membuka email corporate dan juga mempergunakan untuk berbagai

kepentingan surel sehingga tidak terdapat lagi nilai dari akses Dashboard Informasi di BOC dan BCC Badan POM yang rendah,

10. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan keuangan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Sasaran strategis ini diukur oleh 5 indikator kinerja yaitu:

(1) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT;

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT memperlihatkan variasi kinerja sepanjang periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, capaian berada pada angka 83,33%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran masih berada di bawah target yang ditetapkan. Kinerja meningkat pada tahun 2021 dengan capaian 105,26%, menandakan pengelolaan anggaran yang lebih optimal. Pada tahun 2022, capaian kembali berada pada level sangat baik yaitu 100,49%, yang menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran sesuai target.



Gambar 1. 25 Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Tahun 2020-2024

Sementara itu, pada tahun 2023 capaian sedikit menurun menjadi 98,30%, meskipun secara umum masih mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien. Mulai tahun 2024, indikator ini tidak lagi dilakukan sebagai bagian dari penilaian kinerja UPT.

(2) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung;

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung mulai diterapkan sebagai IKU pada tahun 2024, karena pada periode 2020–2023 indikator ini belum digunakan dalam pengukuran kinerja.

Pada tahun pertama pelaksanaannya, kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 92,28 yang melampaui target 90,29, sehingga menghasilkan capaian sebesar 102,20%.



Gambar 1. 26 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Hasil ini mencerminkan bahwa pengelolaan dan penyerapan anggaran di Loka POM telah dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

(3) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa;

Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa mulai diterapkan sebagai IKU pada tahun 2024, karena pada periode 2020–2023 indikator ini belum diimplementasikan dalam pengukuran kinerja. Pada tahun pertama pelaksanaannya, capaian menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 95,00 melampaui target 91,34 sehingga menghasilkan persentase capaian 104,01%.



Gambar 1. 27 Capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2024

Hasil ini menggambarkan bahwa proses pengelolaan barang dan jasa di Loka POM di Kabupaten Belitung telah dilaksanakan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip efisien serta akuntabel.

(4) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara;

Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara mulai diterapkan sebagai IKU pada tahun 2024, karena pada periode 2020–2023 indikator ini belum diimplementasikan dalam mekanisme pengukuran kinerja. Pada tahun pertama penerapannya, capaian menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 93,18 melampaui target 80,00 sehingga menghasilkan persentase capaian 116,48%.



Gambar 1. 28 Capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2020-2024

Hasil ini menggambarkan bahwa proses pengelolaan BMN di Loka POM di Kabupaten Belitung telah berjalan secara efektif, tertib administrasi, dan sesuai prinsip akuntabilitas serta tata kelola aset yang baik.

(5) Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.

Indikator Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri mulai diterapkan sebagai IKU pada tahun 2024, karena pada periode 2020–2023 indikator ini belum digunakan dalam pengukuran kinerja. Pada tahun pertama pelaksanaannya, capaian menunjukkan hasil yang sangat tinggi, dengan realisasi sebesar 99,82 melampaui target 60,00 sehingga menghasilkan persentase capaian 166,37%.



Gambar 1. 29 Capaian Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Tahun 2020-2024

Hasil ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Belitung telah berkomitmen kuat dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta menjalankan prinsip efisiensi, keberpihakan nasional, dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah terkait P3DN.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS10 yaitu (a) Disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan anggaran; (b) Revisi anggaran sesuai dengan jadwal; (c) Pengelolaan dan monitoring realisasi anggaran dengan memanfaatkan SAKTI dan OM SPAN; (d) Pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-catalog, pencatatan pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SPSE serta penyelesaian paket hingga status selesai pada aplikasi e-catalog; (e) Penatausahaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (f) Pemilihan produk barang dan jasa yang memiliki Tingkat Komponen Produk Dalam Negeri yang tinggi sesuai dengan Perencanaan belanja PDN yang diumumkan pada aplikasi Sirup untuk mendukung ketercapaian target.

I.1.2 Aspirasi Stakeholder

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Belitung senantiasa memperkuat kemitraan dan komunikasi dengan para stakeholder, baik internal maupun eksternal. Stakeholder Loka POM di Kabupaten Belitung mencakup unsur pemerintah pusat dan daerah, lembaga penegak hukum,

pelaku usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan, masyarakat, serta mitra pendukung administrasi dan keuangan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan publik, Loka POM di Kabupaten Belitung secara rutin menghimpun aspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholder) melalui berbagai mekanisme, antara lain forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat (IKM), survei analisa kebutuhan stakeholder serta koordinasi dan diskusi bersama pelaku usaha dan instansi terkait, menghasilkan beberapa poin penting mengenai kebutuhan dan harapan stakeholder terhadap kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung, sebagai berikut:

1. Badan POM RI dan Balai POM di Pangkalpinang mengharapkan agar Loka POM di Kabupaten Belitung terus melaksanakan kebijakan teknis pengawasan secara konsisten, tepat sasaran, dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Stakeholder pusat juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan capaian indikator secara periodik serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan lintas wilayah.
2. Pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung mengharapkan peningkatan dukungan terhadap kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana kerja, dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, terdapat aspirasi agar organisasi memperhatikan kesejahteraan pegawai, pengembangan kapasitas teknologi informasi, serta peningkatan budaya kerja yang sehat dan produktif.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan OPD terkait (seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, BNNK, Dinas Kominfo, Dinas Penanaman Modal dan PTSP) menekankan pentingnya sinergi program lintas sektor, terutama dalam pengawasan pangan, pembinaan pelaku usaha lokal, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat. Pemerintah daerah juga berharap Loka POM di Kabupaten Belitung terus menjadi mitra strategis dalam mendukung program prioritas nasional seperti Desa Pangan Aman, Sapa Sekolah, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK).
4. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan berharap koordinasi dan pertukaran informasi hukum dapat terus diperkuat,

khususnya dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Mereka juga memerlukan dukungan Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai sumber data dan tenaga ahli dalam proses penyidikan dan persidangan.

5. Instansi pendukung pengawasan dan logistik seperti Bea Cukai, BNNK, dan KPKNL menyoroti pentingnya sinergi dan keterpaduan data dalam pengawasan produk impor dan barang berisiko tinggi. Stakeholder ini menilai kerja sama yang sudah terjalin berjalan baik, namun masih perlu ditingkatkan pada aspek pertukaran informasi dan kegiatan lapangan terpadu.

6. Organisasi profesi seperti IDI, IAI, dan PAFI menyampaikan kebutuhan untuk dilibatkan secara lebih aktif dalam kegiatan advokasi dan peningkatan kapasitas di bidang kefarmasian dan keamanan produk. Mereka berharap Loka POM di Kabupaten Belitung dapat menjadi mitra diskusi dan edukasi lintas profesi yang membahas isu-isu terkini di bidang obat dan makanan.

7. Pelaku usaha dan sarana pelayanan kefarmasian mengharapkan peningkatan frekuensi pembinaan, sosialisasi regulasi, dan pendampingan dalam proses sertifikasi serta perizinan. Mereka menilai Loka POM di Kabupaten Belitung perlu terus meningkatkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bersahabat, sekaligus memberikan bimbingan teknis yang aplikatif terkait *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Good Distribution Practices (GDP)*, dan *Good Retail Practices (GRP)*.

8. Lembaga pendidikan menyampaikan harapan agar kolaborasi edukasi dan keterampilan di bidang keamanan obat dan makanan terus diperluas, termasuk kegiatan *Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)* di sekolah-sekolah.

9. Masyarakat sebagai penerima manfaat utama layanan berharap Loka POM di Kabupaten Belitung semakin aktif dalam kegiatan edukasi publik, memperluas jangkauan layanan ke daerah terpencil, serta menjaga konsistensi pengawasan agar obat dan makanan yang beredar di wilayah Belitung tetap aman, bermutu, dan terjangkau.

10. Stakeholder pendukung administrasi dan keuangan seperti Bank Mandiri, KPP, KPPN, Kanwil DJPb, dan KPKNL memberikan apresiasi atas ketertiban pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Mereka berharap hubungan kerja sama dan kepatuhan administrasi tetap dipertahankan serta terus ditingkatkan melalui komunikasi dan pelaporan yang tepat waktu dan akurat.

11. Media massa lokal berharap dapat terus menjadi mitra strategis dalam penyebaran informasi yang cepat, akurat, dan edukatif mengenai hasil pengawasan obat dan makanan, kegiatan pembinaan, serta keberhasilan program prioritas Loka POM di Kabupaten Belitung.

Aspirasi ini menjadi dasar penting bagi Loka POM di Kabupaten Belitung dalam menyusun strategi peningkatan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan obat dan makanan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan pemenuhan aspirasi ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung akan semakin tinggi dan pengawasan terhadap obat dan makanan dapat berjalan dengan lebih efektif.

1.2 Potensi dan Permasalahan

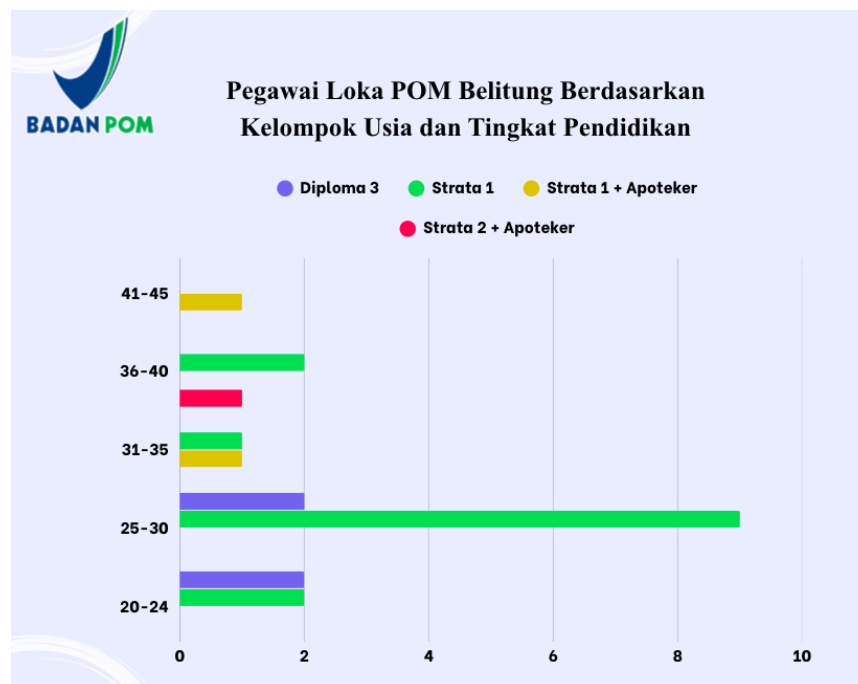
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan secara efektif, Loka POM di Kabupaten Belitung melakukan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats / SWOT*) sebagai dasar dalam perumusan strategi pengembangan organisasi dan peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Kekuatan (Strengths)

Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki sejumlah kekuatan internal yang menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan. Kekuatan utama tersebut meliputi aspek sumber daya manusia (SDM), tata kelola, serta kerja sama lintas sektor.

1. UPT memiliki SDM berusia produktif dan inovatif dari berbagai multidisiplin ilmu.

Berdasarkan data kepegawaian, ASN yang terdaftar pada Loka POM di Kabupaten Belitung berada pada rentang usia sekitar 40 tahun, yang termasuk dalam kategori usia produktif. UPT memiliki sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berasal dari berbagai disiplin ilmu, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan tugas serta tantangan organisasi. Rekrutmen ASN baru dengan kompetensi digital yang tinggi semakin memperkuat kapasitas SDM dalam menghadapi transformasi digital di lingkungan kerja. Selain itu, pelaksanaan pelatihan internal berbasis *e-learning* serta penerapan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif turut mendorong peningkatan kinerja, kreativitas, dan sinergi antar pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.



Gambar 1. 30 Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan pada Loka POM di Kabupaten Belitung

Selain itu, kompetensi pegawai yang dimiliki menjadi dasar pengembangan peta kompetensi dan penerapan budaya kerja lintas fungsi, sehingga setiap pegawai mampu beradaptasi dengan kebutuhan organisasi dan berkontribusi optimal sesuai keahliannya. Pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi antara lain :

1. Pengembangan kompetensi di fungsi tata usaha seperti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengembangan SDM dan lain-lain

2. Pengembangan kompetensi teknis Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai fungsinya yaitu pemeriksaan, penindakan, infokom dan pengujian.

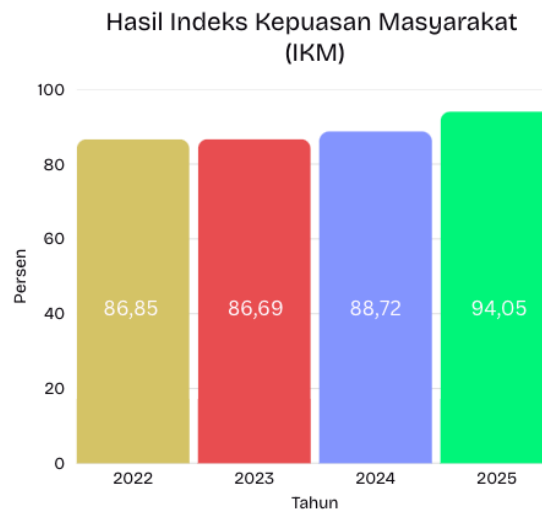
2. Memiliki jejaring yang kuat dengan lintas sektor.

Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki jejaring kerja sama yang kuat dengan berbagai instansi lintas sektor, baik di tingkat daerah maupun lembaga vertikal. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, serta Pemerintah Daerah setempat. Selain itu, kerja sama juga terjalin dengan lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mendukung upaya pengawasan obat dan makanan serta pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya. Sinergi lintas sektor tersebut memperkuat peran Loka POM sebagai mitra strategis dalam mewujudkan sistem pengawasan yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Belitung. Loka POM di Kabupaten Belitung telah menjalin kesepakatan bersama (MoU) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayah setempat. Kerja sama tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup dukungan terhadap kegiatan pengawasan, pembinaan pelaku usaha, serta edukasi kepada masyarakat. Berdasarkan laporan implementasi PKS, kebijakan daerah juga telah selaras dengan arah kebijakan pengawasan BPOM, baik dalam aspek perlindungan konsumen maupun peningkatan mutu pelayanan publik. Sinergi ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang terpadu dan efektif.

3. Pelayanan publik berkualitas dan meningkat

Loka POM di Kabupaten Belitung senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun terakhir, tingkat kepuasan terhadap layanan mencapai 94,05%, yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik.” Capaian ini menunjukkan

peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan.



*Gambar 1. 31 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Loka POM di
Kabupaten Belitung*

Selain itu, Loka POM Belitung memperoleh Predikat Pelayanan Prima pada tahun 2024 dari Badan POM RI sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi penerapan standar pelayanan yang profesional, responsif, dan transparan. Upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas layanan ini menjadi bukti nyata komitmen Loka POM Belitung dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik yang unggul di daerah.

4. Pegawai berintegritas tinggi.

Pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung senantiasa menjunjung tinggi nilai integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penetapan Surat Keputusan Agen Perubahan (Agent of Change) yang berperan aktif dalam menumbuhkan budaya kerja berintegritas, transparan, dan bebas dari praktik koruptif di lingkungan kerja. Selain itu, penerapan mekanisme Laporan Benturan Kepentingan dilakukan secara konsisten sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen Loka POM Belitung dalam memperkuat tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berintegritas tinggi.

5. Keterlibatan secara aktif pada Mal Pelayanan Publik (MPP)

Loka POM di Kabupaten Belitung berperan aktif dalam mendekatkan layanan pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat melalui keikutsertaan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan, tetapi juga memperkuat sinergi antar instansi dalam mewujudkan pelayanan terpadu yang cepat, transparan, dan berkualitas. Atas komitmen dan kinerjanya, Loka POM Belitung mendapat pengakuan dari penyelenggara MPP di Kabupaten Belitung sebagai salah satu gerai pelayanan publik berprestasi, yang mencerminkan dedikasi instansi dalam memberikan layanan prima serta mendukung agenda reformasi birokrasi di tingkat daerah. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal dan terjadwal, Loka POM di Kabupaten Belitung menetapkan jam operasional di MPP Kabupaten Belitung setiap hari Jumat pukul 08.00–16.00 WIB dan MPP Belitung Timur setiap hari Senin minggu ke-2 dan ke-4 pukul 08.00–16.00 WIB. Layanan yang diselenggarakan meliputi konsultasi tentang penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan, sertifikasi CDOB dan CPOTB, serta sertifikasi CPKB Golongan A dan B, layanan penerbitan rekomendasi notifikasi kosmetik, izin penerapan CPPOB, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi terkait obat dan makanan.

6. Kemudahan akses informasi publik

Loka POM di Kabupaten Belitung berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan informasi secara profesional dan terstruktur. Seluruh laporan kegiatan dan dokumentasi layanan PPID tersedia dan dapat diakses secara terbuka melalui Subsite Resmi Loka POM Belitung, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah, cepat, dan akurat. Upaya ini mencerminkan kesungguhan Loka POM Belitung dalam mendukung prinsip transparansi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

7. Pengelolaan arsip di UPT telah mendapat predikat sangat memuaskan

Loka POM di Kabupaten Belitung menunjukkan komitmen tinggi dalam penerapan tata kelola kearsipan yang tertib, sistematis, dan sesuai standar nasional. Atas kinerja tersebut, Loka POM Belitung berhasil meraih penghargaan sebagai Unit Kearsipan III Terbaik ke-III dengan Kategori AA pada tahun 2025, berdasarkan hasil penilaian dari Badan POM RI. Penghargaan ini dituangkan dalam Sertifikat Pengakuan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan konsistensi Loka POM Belitung dalam pengelolaan arsip yang profesional dan akuntabel. Capaian tersebut menjadi bukti nyata penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berkinerja tinggi.



Gambar 1. 32 Piagam Penghargaan dari BPOM Pusat terkait Arsip

Kelemahan (Weaknesses)

1. Keterbatasan Kompetensi SDM dalam Mendukung Efektivitas Pengelolaan BMN, Pengujian, dan Sampling.

Kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pelaksanaan pengujian, dan kegiatan sampling masih menghadapi tantangan dari sisi kompetensi teknis Sumber Daya Manusia (SDM). Kompetensi petugas BMN perlu ditingkatkan agar tata kelola aset berjalan lebih efektif, tertib, dan akuntabel, termasuk melalui bimbingan

teknis dan sertifikasi audit BMN serta penyempurnaan SOP. Di sisi lain, SDM pengujian belum sepenuhnya sesuai dengan hasil Analisis Beban Kerja (ABK), baik dari segi jumlah maupun kualifikasi, sehingga diperlukan penyesuaian formasi dan peningkatan kapasitas agar pelaksanaan fungsi pengujian lebih optimal. Sementara itu, penanggung jawab sampling juga masih memerlukan penguatan pemahaman terhadap pedoman sampling, penandaan, dan evaluasi label produk. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam mendukung efektivitas pengawasan dan pelayanan publik, sehingga diperlukan strategi peningkatan kompetensi secara menyeluruh melalui pelatihan teknis, supervisi, dan pendampingan berkelanjutan agar seluruh fungsi berjalan konsisten sesuai regulasi dan standar operasional yang berlaku.

2. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur Laboratorium serta Kantor Loka POM Belitung.

Loka POM di Kabupaten Belitung masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pemenuhan standar fasilitas dan infrastruktur. Laboratorium belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan **Good Laboratory Practice (GLP)**, ditandai dengan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, tenaga pengujian yang belum tersertifikasi, serta peralatan yang memerlukan modernisasi dan kalibrasi berkala untuk menjamin keandalan hasil uji. Selain itu, sarana pengujian kimia dan mikrobiologi belum lengkap, sehingga kapasitas analisis sampel masih terbatas dan belum optimal. Kondisi ini diperparah oleh belum tersedianya **kantor permanen**, karena saat ini masih menggunakan bangunan sewa yang berdampak pada keterbatasan ruang kerja dan fasilitas pendukung. Hal serupa juga terjadi pada **gudang barang bukti**, yang belum memenuhi standar keamanan sesuai ketentuan, sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap barang bukti hasil penindakan. Keseluruhan aspek tersebut menegaskan perlunya strategi pengadaan bertahap, peningkatan alokasi anggaran, serta pembangunan kantor dan laboratorium permanen yang representatif, agar mutu layanan pengujian, pengawasan, dan pengelolaan barang bukti dapat terlaksana secara konsisten sesuai regulasi dan standar yang berlaku.

3. Belum ada program pelatihan K3 Umum dan Laboratorium.

Pelaksanaan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum maupun K3 Laboratorium di Loka POM di Kabupaten Belitung belum terlaksana secara formal dan terencana. Hingga saat ini, belum terdapat sertifikat K3 yang dimiliki oleh pegawai, serta belum tersedia notulen atau dokumentasi kegiatan pelatihan K3 sebagai bukti pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan pelatihan K3 Umum dan Laboratorium masih perlu disusun secara sistematis guna memastikan seluruh pegawai memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam menjaga keselamatan kerja, terutama di lingkungan laboratorium yang memiliki potensi risiko tinggi.

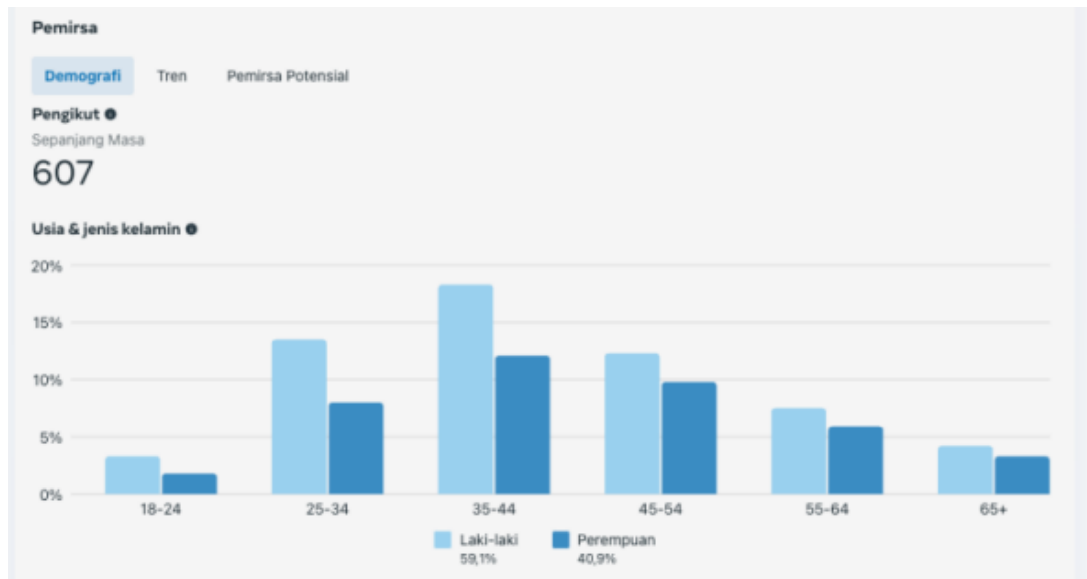
4. Ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang Jasa & administrasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Loka POM di Kabupaten Belitung, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian administratif maupun prosedural berdasarkan hasil laporan audit internal dan laporan audit Inspektorat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal masih perlu diperkuat, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan dokumentasi proses pengadaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penegakan standar operasional prosedur, serta pengawasan berjenjang untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas.

C. Peluang (Opportunities)

1. Pengguna media sosial didominasi oleh usia remaja – produktif

Pengguna media sosial yang menjadi sasaran komunikasi publik Loka POM di Kabupaten Belitung didominasi oleh kelompok usia remaja hingga produktif, yang memiliki tingkat interaksi digital tinggi.



Gambar 1. 33 Grafik Usia dan Jenis Kelamin pengguna Sosial media Tahun 2024

Melalui akun resmi media sosial, Loka POM Belitung secara aktif melakukan edukasi dan diseminasi informasi terkait keamanan obat dan makanan dengan memanfaatkan data engagement untuk mengukur efektivitas pesan yang disampaikan. Berdasarkan tren peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan media sosial, termasuk tingginya tingkat engagement pada akun Instagram BPOM, strategi komunikasi digital ini menjadi sarana efektif dalam meningkatkan literasi publik serta memperluas jangkauan informasi pengawasan di masyarakat.

2. Kepercayaan masyarakat terhadap Loka POM

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Loka POM di Kabupaten Belitung terus menunjukkan tren positif, seiring dengan peningkatan kinerja pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Hal ini tercermin dalam Laporan Kinerja serta hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun terakhir, di mana tingkat kepuasan terhadap layanan mencapai 94,05%, menunjukkan apresiasi tinggi masyarakat terhadap mutu layanan pengawasan obat dan makanan. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa Loka POM Belitung telah berhasil membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, responsif, dan berintegritas tinggi.

3. Jangkauan wilayah pengawasan dan daerah kepulauan

Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki jangkauan wilayah pengawasan terjauh dengan durasi perjalanan mencapai 24 jam terutama untuk pulau-

pulau yang jaraknya cukup jauh dari pulau Belitung. Hal ini membutuhkan komitmen tinggi dalam memastikan pengawasan obat dan makanan dilakukan secara menyeluruh hingga sampai ke wilayah paling terpencil. Dengan adanya peluang ini, rencana kegiatan pengawasan dapat dioptimalkan menjangkau wilayah terjauh.

4. Perkembangan teknologi yang mendukung untuk transparansi & akuntabilitas pelayanan

Perkembangan teknologi informasi turut mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan di Loka POM di Kabupaten Belitung. Melalui Portal SPBE BPOM, satuan kerja berkomitmen untuk melaksanakan transformasi digital sesuai kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diterapkan secara nasional. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui SILADA, yang memuat data Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM berbasis *Google Sheet*, menjadi sarana efektif dalam memastikan keterbukaan informasi, akurasi data, serta akuntabilitas pelaporan kinerja secara real-time.

D. Ancaman (Threats)

1. Sarana produksi dan distribusi Obat dan makanan belum sesuai peraturan perundang-undangan

Masih terdapat sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data hasil pengawasan Tahun 2024 dan laporan tindak lanjut pengawasan, ditemukan sejumlah pelaku usaha yang Tidak memenuhi ketentuan (TMK) dan memerlukan peningkatan pemahaman dan pemenuhan standar keamanan serta mutu produk.

Tabel 1. 2 Tabel Sarana yang diperiksa Tahun 2024

No	Sarana Diperiksa 2024	Jumlah	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1	Produksi	38	26	12
2	Distribusi	197	136	61

Masih ditemukan beberapa penyimpangan terkait dengan administrasi dan operasional pengelolaan obat untuk sarana pelayanan kefarmasian; mengedarkan produk Tanpa Izin Edar, TMK label dan kedaluwarsa untuk sarana distribusi OT, kosmetik dan pangan. Kondisi ini disebabkan oleh

keterbatasan kapasitas pembinaan di daerah serta lemahnya komitmen sarana produksi dan distribusi terkait pentingnya menjaga keamanan mutu dan khasiat Obat dan makanan.

2. Adanya potensi penawaran gratifikasi oleh Pelaku usaha atau lintas sektor

Terdapat potensi penawaran gratifikasi dari pelaku usaha maupun pihak lintas sektor yang dapat mengancam objektivitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Meskipun demikian, Loka POM di Kabupaten Belitung telah berupaya melakukan pencegahan melalui penerapan budaya integritas dengan sosialisasi gratifikasi dan benturan kepentingan disertai penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai serta pelaporan rutin melalui Forum Koordinasi Anti Gratifikasi dan Pengendalian Gratifikasi (FKAP). Upaya tersebut menjadi bentuk komitmen nyata dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi gratifikasi.

3. Risiko kecelakaan kerja

Risiko kecelakaan kerja menjadi salah satu ancaman yang perlu mendapatkan perhatian serius pada Loka POM di Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Berdasarkan analisa risiko, masih terdapat potensi bahaya yang dapat timbul disebabkan oleh keadaan lingkungan, kendaraan operasional yang belum dapat dipastikan kondisi pemeliharannya minimnya alat pelindung diri, serta belum diberlakukannya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 di laboratorium. Kondisi ini dapat berdampak pada keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan kinerja pengawasan. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Belitung perlu memperkuat penerapan budaya K3, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan keselamatan kerja, serta memastikan ketersediaan sarana pelindung yang memadai sebagai langkah preventif terhadap risiko kecelakaan kerja di lapangan.

4. Pengendalian AMR pada Sarana Pelayanan Kefarmasian belum optimal

Penyerahan antibiotik tanpa resep dokter pada sarana kefarmasian (saryanfar) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi tantangan strategis bagi Loka POM di Kabupaten Belitung dalam

memastikan penyerahan dan penggunaan obat yang rasional. Berdasarkan laporan AMR dan hasil pemeriksaan, masih ditemukan kelemahan dalam penyerahan antibiotik kepada masyarakat terbukti dengan prosentase penyerahan antibiotika tanpa resep dokter pada sarana pelayanan kefarmasian tahun 2024 mencapai 82,93 %. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penggunaan antibiotik secara tidak rasional dan mempercepat munculnya resistensi antimikroba. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM pengawas, serta pelaksanaan pembinaan yang lebih intensif dan berkelanjutan guna mendukung efektivitas pengendalian AMR di wilayah pengawasan.

5. Maraknya Penjualan produk ilegal secara daring.

Penjualan produk obat dan makanan ilegal secara daring yang terus meningkat menjadi salah satu ancaman signifikan bagi efektivitas pengawasan Loka POM di Kabupaten Belitung. Berdasarkan Laporan Penindakan dan hasil Cyber Patrol, masih ditemukan aktivitas perdagangan produk tanpa izin edar maupun tidak memenuhi standar keamanan. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan area pengawasan dunia maya serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko produk ilegal. Untuk itu, diperlukan penguatan pemantauan siber, peningkatan literasi konsumen, serta kolaborasi lintas sektor dalam menekan peredaran produk ilegal secara daring dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemantauan patroli siber oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dengan Jumlah tautan yang direkomendasikan takedown sebanyak 296 tautan dan untuk tahun 2025 sampai dengan Oktober telah dilakukan pemantauan dengan Jumlah tautan yang direkomendasikan takedown sebanyak 225 tautan.

6. Potensi Insiden Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan karena pemberian Makan Bergizi Gratis

Potensi terjadinya insiden Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan dapat terjadi seiring pelaksanaan program Pemberian Makan Bergizi Gratis menjadi ancaman terhadap keamanan pangan dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan dokumen laporan kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan dan laporan koordinasi bersama lintas sektor terkait potensi pengelolaan

makanan yang belum memenuhi standar Higiene dan sanitasi. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kontaminasi dan menurunkan mutu pangan yang disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Belitung perlu memperkuat koordinasi teknis dengan instansi terkait, memastikan penerapan standar keamanan pangan yang seragam, serta melakukan pemantauan intensif terhadap proses penyediaan dan distribusi makanan bergizi gratis.

7. Perubahan tren dan kreativitas produk baru Obat dan makanan dari UMKM

Perubahan tren dan meningkatnya kreativitas produk baru obat dan makanan dari pelaku UMKM menghadirkan tantangan tersendiri bagi efektivitas pengawasan Loka POM di Kabupaten Belitung. Berdasarkan daftar UMKM binaan dan laporan pendampingan, terlihat bahwa inovasi produk berkembang pesat baik dari segi bentuk, bahan, maupun klaim manfaat. Namun, adaptasi regulasi terhadap inovasi tersebut belum sepenuhnya responsif, sehingga berpotensi menimbulkan celah dalam pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan keamanan, mutu, dan manfaat produk. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pembinaan, penyusunan panduan adaptif terhadap inovasi produk UMKM, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pertumbuhan industri lokal yang tetap sesuai dengan standar regulatori.

8. Adanya pra peradilan dalam proses penyidikan yang ditangani oleh PPNS Loka POM Belitung

Terjadinya pra peradilan dalam proses penyidikan yang ditangani oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Belitung menjadi tantangan serius dalam menjaga kredibilitas dan integritas penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Berdasarkan Laporan Kemajuan Penindakan, Pra peradilan tersebut memang merupakan hak pelaku atau tersangka yang merasa bahwa prosedur penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses hukum dan mempengaruhi persepsi publik terhadap profesionalisme penyidik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum bagi PPNS, pengawasan berlapis terhadap setiap tahapan penyidikan, serta

dokumentasi yang lengkap dan akurat untuk memastikan seluruh proses penindakan berjalan sesuai prosedur dan prinsip keadilan.

Tabel Analisis SWOT

Tabel 1. 3 Matriks Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Belitung

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1. UPT memiliki SDM berusia produktif dan inovatif dari berbagai multidisiplin ilmu. 2. Memiliki jejaring yang kuat dengan lintas sektor. 3. Pelayanan publik berkualitas dan meningkat 4. Pegawai berintegritas tinggi. 5. Keterlibatan secara aktif pada Mal Pelayanan Publik (MPP) 6. Kemudahan akses informasi publik 7. Pengelolaan arsip di UPT telah mendapat predikat sangat memuaskan	1. Keterbatasan Kompetensi SDM dalam Mendukung Efektivitas Pengelolaan BMN, Pengujian, dan Sampling. 2. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur Laboratorium serta Kantor Loka POM Belitung. 3. Belum ada program pelatihan K3 Umum dan Laboratorium. 4. Ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang Jasa & administrasi
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1. Pengguna media sosial didominasi oleh usia remaja – produktif 2. Kepercayaan masyarakat terhadap Loka POM 3. Jangkauan wilayah pengawasan dan daerah kepulauan 4. Perkembangan teknologi yang mendukung untuk transparansi & akuntabilitas pelayanan	1. Sarana produksi dan distribusi Obat dan makanan belum sesuai peraturan perundang-undangan 2. Adanya potensi penawaran gratifikasi oleh Pelaku usaha atau lintas sektor 3. Risiko kecelakaan kerja lapangan 4. Pengendalian AMR pada saryanfar belum optimal 5. Penjualan produk ilegal secara daring meningkat

	6. Potensi Insiden Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan karena pemberian Makan Bergizi Gratis 7. Perubahan tren dan kreativitas produk baru Obat dan makanan dari UMKM 8. Terhambatnya proses pemberkasan perkara serta adanya pra peradilan dalam proses penyidikan yang ditangani oleh PPNS Loka POM Belitung
--	---

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Belitung. Loka POM di Kabupaten Belitung mendukung pencapaian Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) periode 2025–2029, yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia EMAS 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Penjelasan Visi:

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat

bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2 MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan

mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola

yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Loka POM di Kabupaten Belitung sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM dalam memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Dukungan Loka POM di Kabupaten Belitung diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan, pembinaan, serta layanan publik yang memastikan keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi di wilayah Kabupaten Belitung.

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi

- konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan Ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di Sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang ada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
 4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
 5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan	75,75	76,4	77,75	79,45	80,7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Olahan yang Aman dan Bermutu	Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu					
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Petumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,6	66,2	69,3	72,7	76,7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

Loka POM di Kabupaten Belitung sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh tujuan BPOM. Setiap kegiatan pengawasan, pembinaan, dan layanan publik yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dirancang untuk memastikan tercapainya indikator tujuan BPOM.

2.4 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Belitung dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Belitung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Belitung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah

kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai AKIP UPT BPOM
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Belitung periode 2025-2029

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/ atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/ Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
yang produktif dan berdaya saing	<i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	<i>Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 6. Persentase pemenuhan dokumen</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			SAKIP UPT sesuai standar 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Belitung 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, Loka POM dapat mengenali potensi hambatan dan tantangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Pendekatan ini juga memastikan bahwa setiap sasaran kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung tercapainya pengawasan obat, pangan olahan, dan pelayanan publik yang prima.. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis BPOM sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Belitung

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Meningkatnya insiden Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan karena pemberian Makan Bergizi Gratis	a. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bimbingan teknis terhadap Pengawas, SPPI dan SPPG b. Koordinasi dengan BGN terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap Sarjana	Tim Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat.	
		Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Kosmetik di fasilitas peredaran	Tim Pemeriksaan
		Pengendalian AMR pada sarana pelayanan kefarmasian belum optimal	Melakukan pemeriksaan ke sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian terkait analisa kewajaran penyaluran antibiotik	Tim Pemeriksaan
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Adanya ketidaksesuain jumlah sarana produksi fortifikasi keseluruhan di wilayah kerja Loka POM Belitung antara database pusat (wasprod pangan olahan) dengan data Loka POM Belitung	Melakukan koordinasi dengan wasprod pangan olahan	Tim Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Teknis komunikasi dan publikasi tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat maka dapat menurunkan kesadaran masyarakat akan keamanan pangan.	Peningkatan strategi KIE digital & edukatif	Tim Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Perubahan tren dan kreativitas produk baru Obat dan makanan dari UMKM	Pendampingan terhadap inovasi produk	Tim Infokom
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Adanya potensi terjadi pra peradilan dalam proses penyidikan	1. Monitoring proses penyidikan oleh atasan PPNS 2. Koordinasi dengan Korwas PPNS	Tim Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Maraknya penjualan produk ilegal secara daring	Melakukan patroli siber terhadap link/tautan yang menjual sediaan farmasi dan pangan olahan TIE di marketplace dan merekomendasikan untuk dilakukan takedown serta melakukan profiling	Tim Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang prima	Kompetensi Petugas pelayanan	a. Peningkatan Kompetensi Petugas	Tim Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		publik dan sarana prasarana terkait PUGIS belum Optimal	b. Penyediaan sarana dan prasarana terkait PUGIS	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Potensi penawaran Gratifikasi oleh Pelaku Usaha	Sosialisasi SILAGAK (Siap Tolak Gratifikasi) secara rutin kepada seluruh Pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung	Tata Usaha
		Pengelolaan BMN belum optimal	a. Peningkatan Kompetensi Petugas b. Pengoptimalan penggunaan aplikasi SIMAN Mobile	Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik *online* maupun *offline*.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk- produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG

Loka POM di Kabupaten Belitung berkomitmen untuk mendukung tujuh arah kebijakan utama BPOM, yaitu::

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran

sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik online maupun offline.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk

mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mendukung tujuh arah kebijakan utama Badan POM, Loka POM di Kabupaten Belitung menyusun strategi pelaksanaan pengawasan dan penguatan kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas, kolaborasi, serta inklusivitas dalam setiap program dan kegiatan. Strategi ini juga mengintegrasikan prinsip Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan layanan yang diberikan memberikan manfaat yang adil dan setara bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Strategi yang akan dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre- dan post-market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta dukungan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Loka POM di Kabupaten Belitung menerapkan strategi pengawasan berbasis risiko melalui intensifikasi sampling, inspeksi sarana, dan pengawasan terpadu lintas sektor. Dukungan terhadap Program MBG dilakukan dengan memastikan keamanan pangan siap saji yang dikonsumsi oleh kelompok sasaran melalui pendampingan, edukasi, serta penerapan *Good Handling Practices* pada penjamah pangan. Pendekatan PUGIS diterapkan dengan memastikan keterlibatan aktif perempuan dan kelompok rentan dalam pelatihan keamanan pangan, baik sebagai pelaku usaha maupun penerima manfaat.

2. Penguatan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Loka POM di Kabupaten Belitung memperkuat sistem deteksi dini dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah dalam menanggulangi peredaran produk ilegal, baik secara daring maupun luring. Kegiatan intelijen pengawasan dikembangkan dengan pendekatan digital dan partisipasi masyarakat. PUGIS diimplementasikan dengan memastikan bahwa edukasi pencegahan penyalahgunaan obat dan produk berbahaya menjangkau kelompok remaja, perempuan, dan komunitas marginal secara setara.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM.

Strategi Loka POM di Kabupaten Belitung difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kepatuhan pelaku usaha melalui kegiatan *coaching clinic*, bimbingan teknis, dan fasilitasi sertifikasi. Keberpihakan terhadap UMKM diwujudkan melalui kemudahan akses informasi regulasi dan pendampingan intensif, terutama bagi pelaku usaha perempuan dan kelompok usaha kecil di daerah terpencil. Penerapan PUGIS memastikan bahwa pelaku usaha dari berbagai latar belakang sosial dan gender mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan daya saingnya.

4. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.

Melalui program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Loka POM di Kabupaten Belitung mengembangkan strategi edukasi yang adaptif terhadap kondisi lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi perempuan. PUGIS diterapkan dengan menyusun materi komunikasi yang inklusif dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok umur, gender, dan latar sosial, guna membangun budaya sadar keamanan pangan dan obat di seluruh lapisan masyarakat.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi lintas sektor di bidang pengawasan. Loka POM di Kabupaten Belitung memperkuat jejaring kerja dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi dilakukan dalam bentuk forum koordinasi, kegiatan lintas sektor, serta pertukaran data pengawasan. PUGIS menjadi landasan dalam memastikan seluruh mitra kerja memiliki komitmen yang sama terhadap prinsip kesetaraan dan inklusi sosial dalam setiap kebijakan bersama.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian, dan transformasi digital. Strategi ini difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis dan nonteknis pegawai, termasuk pelatihan berbasis teknologi informasi, manajemen risiko, serta laboratorium pengujian yang berstandar tinggi. Transformasi digital diterapkan melalui sistem pengawasan elektronik dan otomasi pelaporan. Prinsip PUGIS diterapkan dengan memberikan akses setara terhadap pelatihan dan kesempatan pengembangan karier bagi seluruh pegawai tanpa membedakan gender, usia, atau latar belakang sosial.

7. Penguatan dukungan manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.

Loka POM di Kabupaten Belitung berkomitmen memperkuat sistem manajemen internal melalui tata kelola yang akuntabel, efisien, dan berorientasi hasil. Pengembangan pelayanan publik dilakukan melalui digitalisasi proses perizinan, pengaduan, dan informasi produk. Dalam pelaksanaannya, PUGIS diintegrasikan dengan memastikan akses layanan publik yang setara, ramah kelompok rentan, serta memperhatikan aspek inklusi digital.

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan BPOM dan Strategi Loka POM di Kabupaten Belitung

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Memperkuat pengawasan berbasis risiko melalui intensifikasi sampling, inspeksi sarana, dan pengawasan terpadu lintas sektor dan mendukung Program MBG untuk keamanan pangan.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Meningkatkan efektivitas deteksi dini dan penindakan pelanggaran dengan kolaborasi lintas sektor
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Memperkuat pembinaan UMKM agar patuh regulasi dan mampu meningkatkan daya saing produk
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatkan literasi dan partisipasi publik dengan mengembangkan strategi edukasi yang adaptif terhadap kondisi lokal melalui edukasi dan KIE

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Memperkuat jejaring lintas sektor untuk koordinasi dan kolaborasi pengawasan
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mengembangkan kompetensi pegawai dan memperkuat laboratorium serta digitalisasi sistem pengawasan
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Memperkuat tata kelola organisasi dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Belitung juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi diatas, Loka POM di Kabupaten Belitung melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM ". Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *premarket control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, loka tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

Berikut uraian program dan kegiatan untuk mendukung arah kebijakan dan Strategi tersebut :

1. Kegiatan dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Pulau Belitung

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung mencakup pengawasan *pre dan post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, loka tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM.

a. Pengawasan Pre-Market terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar telah memenuhi persyaratan izin edar, keamanan, mutu, dan gizi sebelum masuk ke pasaran. Pengawasan pre-market mencakup pemeriksaan dokumen, verifikasi sarana produksi dan distribusi, serta penilaian terhadap produk yang diajukan untuk mendapatkan izin edar. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaku usaha baru agar memahami ketentuan regulasi sebelum memasarkan produk.

b. Pengawasan Post-Market terhadap Produk yang Beredar di Pasaran

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan produk yang telah beredar tetap memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan inspeksi sarana distribusi dan penjualan, pengambilan sampel produk, serta pengujian di laboratorium. Fokus pengawasan diarahkan pada produk berisiko tinggi, produk tanpa izin edar, produk kadaluarsa, dan produk dengan klaim yang menyesatkan. Hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan pembinaan, peringatan, hingga rekomendasi penindakan apabila ditemukan pelanggaran.

c. Pengawasan Terhadap Sarana Produksi dan Distribusi

Kegiatan ini meliputi pemeriksaan sarana produksi obat, kosmetika, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan untuk memastikan penerapan Cara Produksi yang Baik (CPB) serta Cara Distribusi yang Baik (CDB). Pengawasan juga mencakup sarana pelayanan kefarmasian, seperti apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit, guna menjamin

penyaluran obat yang aman dan sesuai ketentuan. Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar pembinaan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

- d. Pengawasan Keamanan Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional, Loka POM di Kabupaten Belitung melakukan pengawalan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini mencakup pembinaan dan pendampingan kepada penyelenggara serta penjamah pangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan siap saji. Pengawasan dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir untuk memastikan pangan yang diberikan kepada kelompok sasaran aman dan bergizi.
- e. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Loka POM di Kabupaten Belitung melaksanakan berbagai bentuk KIE seperti sosialisasi, penyuluhan, kampanye publik, serta pemanfaatan media sosial dan media massa untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya konsumsi produk yang aman, bermutu, dan berizin edar. Kegiatan KIE juga melibatkan sekolah, komunitas, dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan masyarakat cerdas dan mandiri dalam pengawasan obat dan makanan.
- f. Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Pelaku Usaha (*Regulatory Assistance*)
Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memahami dan memenuhi ketentuan regulasi di bidang obat dan makanan. Pendampingan mencakup bimbingan teknis, asistensi perizinan, fasilitasi penerapan CPOB dan CPPOB, serta pembinaan terhadap pelaku usaha yang ditemukan belum patuh. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar produk lokal yang aman dan berkualitas.
- g. Kegiatan Penindakan terhadap Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan
Kegiatan ini bertujuan menindaklanjuti hasil temuan pengawasan yang menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dilakukan dengan mengedepankan prinsip pencegahan dan deteksi dini melalui kerja sama lintas sektor, termasuk

aparatus penegak hukum dan pemerintah daerah. Tindakan yang dilakukan dapat berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan, penarikan produk dari peredaran, hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Kegiatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan, kepolisian, dan lembaga pendidikan. Bentuk kolaborasi mencakup pembentukan jejaring keamanan pangan, pelaksanaan operasi bersama, pertukaran data pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam mendukung efektivitas pengawasan.

2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, efisien, dan berkelanjutan. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan untuk menjamin tersedianya fasilitas operasional yang mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan, pelayanan publik, serta administrasi perkantoran.

a. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana kantor agar selalu berfungsi dengan baik dan siap mendukung operasional pengawasan. Pemeliharaan dilakukan secara rutin dan berkala terhadap gedung kantor, kendaraan dinas, instalasi listrik, air, pendingin ruangan, serta sistem keamanan kantor. Selain itu, kegiatan ini mencakup penataan dan optimalisasi ruang kerja, perawatan taman dan area lingkungan, serta pelaksanaan kebersihan dan kerapian kantor. Dengan pelaksanaan pemeliharaan yang terencana, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan produktif bagi seluruh pegawai.

b. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mendukung Operasional Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung. Pengadaan dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan, meliputi peralatan kantor, komputer dan perangkat teknologi informasi, alat komunikasi, perlengkapan administrasi, serta

peralatan pengawasan lapangan seperti alat sampling dan alat keselamatan kerja. Proses pengadaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengelolaan barang/jasa pemerintah dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

c. Kegiatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium serta Sarana Pengawasan

Kegiatan ini difokuskan pada pemeliharaan peralatan laboratorium dan sarana pengawasan agar tetap berfungsi dengan baik, akurat, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kalibrasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan alat ukur yang digunakan dalam kegiatan pengujian dan pemeriksaan sampel. Selain itu, dilakukan perawatan terhadap sarana pengawasan lapangan seperti alat sampling, alat transportasi, dan perangkat digital. Pelaksanaan kegiatan ini mendukung terjaminnya mutu hasil pengawasan dan efektivitas pelaksanaan tugas teknis.

d. Kegiatan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara (BMN)

Kegiatan ini mencakup proses pencatatan, pengadministrasian, pelaporan, dan inventarisasi aset milik negara yang dikelola oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Seluruh kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIMAK-BMN/Sakti untuk menjamin ketertiban administrasi serta keakuratan data aset. Selain itu, dilakukan pemutakhiran data, pengusulan penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai, serta pengawasan penggunaan BMN agar tetap sesuai ketentuan. Melalui pengelolaan aset yang baik, diharapkan tercipta tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara.

e. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung efisiensi dan transparansi pengelolaan sarana dan prasarana melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan sistem elektronik diterapkan dalam proses administrasi, pencatatan aset, pemantauan pemeliharaan, serta manajemen dokumen. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Belitung mengimplementasikan prinsip *green office* dengan mendorong penghematan energi, digitalisasi arsip, dan pengurangan penggunaan kertas. Melalui kegiatan ini, diharapkan

pengelolaan sarana dan prasarana menjadi lebih efektif, modern, dan ramah lingkungan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan arah kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) periode 2025–2029. Target ini menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung dalam mendukung pencapaian tujuan strategis BPOM, khususnya dalam bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja. Berikut adalah Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung 2025-2029, disusun menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (mengacu kerangka logis kinerja BPOM :

Tabel 4. 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	82,50	83,75	85	86,25
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	0	27	28	29	30
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	80	81	82	83
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	95	96	97	98
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95,75	96,50	97.25	98
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	92,20	93,40	94,60	95,80
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	18	19	20	21	22
		Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50	100	100	100	100
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90	91	92	93	94
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	100	100	100	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,78	86,64	87,49	88,35	89,21
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	3	4	5	6
		Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13,79	31.03	51.72	75,86	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	92	93	94	95
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,05	4,15	4,25	4,35	4,51
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,70	76,70	77,70	78,70	80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	3	3	3	3

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Implementasi Rencana Reformasi Birokrasi Aksi	100	100	100	100	100

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan maka perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Belitung periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kebutuhan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Belitung 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi Anggaran				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan	1.456,5	1.602,2	1.762,4	1.938,6	2.132,5
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1.992,2	2.191,4	2.410,5	2.651,6	2.916,8
TOTAL	3.448,7	3.793,6	4.172,9	4.590,2	5.049,3

Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Belitung 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.448,7	3.793,6	4.172,9	4.590,2	5.049,3
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
TOTAL	3.448,7	3.793,6	4.172,9	4.590,2	5.049,3

Berdasarkan kerangka pendanaan pada Tabel 4.3, seluruh kebutuhan anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung untuk periode 2025–2029 sepenuhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Hal ini disebabkan karena Loka POM Belitung tidak memiliki sumber pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional maupun pengembangan fasilitas. Dengan demikian, pemenuhan seluruh program, kegiatan, serta belanja operasional dan non-operasional sangat bergantung pada alokasi RM melalui mekanisme penganggaran pemerintah pusat.

Kerangka pendanaan Loka POM di Kabupaten Belitung untuk periode 2025-2029 bertujuan untuk memastikan tersedianya dukungan finansial yang memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan obat dan makanan secara optimal di wilayah tersebut. Pendanaan ini dirancang untuk mendanai pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, intensifikasi pengawasan produk di pasar, serta pelaksanaan program edukasi masyarakat terkait keamanan produk obat dan makanan. Dengan adanya kerangka pendanaan yang terencana, diharapkan Loka POM dapat berkontribusi dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk aman, serta mendukung pencapaian tujuan kesehatan nasional di Kabupaten Belitung.

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Loka POM di Kabupaten Belitung, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2025–2029 telah disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja, dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator kinerja Badan POM periode 2025–2029. Renstra ini memuat perencanaan strategis secara terukur, terarah, dan sistematis, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan.

Melalui pelaksanaan Renstra ini, Loka POM di Kabupaten Belitung berkomitmen untuk mendukung penuh arah kebijakan BPOM dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperluas pendampingan pelaku usaha terutama UMKM, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan sinergi lintas sektor. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan pengawasan yang lebih responsif terhadap dinamika risiko dan tantangan global di bidang obat dan makanan.

Renstra ini juga diharapkan menjadi landasan bagi peningkatan kinerja organisasi yang akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penerapan transformasi digital dalam pengawasan dan pelayanan publik.

Dengan semangat kolaborasi dan integritas, Loka POM di Kabupaten Belitung siap melaksanakan seluruh strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra ini untuk mencapai visi Badan POM, yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Loka POM di Kabupaten Belitung								3.448,7	3.793,6	4.172,9	4.590,2	5.049,3	Loka POM di Kabupaten Belitung	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								1.456,5	1.602,2	1.762,4	1.938,6	2.132,5	Loka POM di Kabupaten Belitung	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												Loka POM di Kabupaten Belitung	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Belitung	81,25	82,5	83,75	85	86,25						Loka POM di Kabupaten Belitung
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Loka POM di Kabupaten Belitung	0	27	28	29	30						Loka POM di Kabupaten Belitung
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Belitung	90	91	92	93	94						Loka POM di Kabupaten Belitung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Belitung	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Belitung
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Belitung	91	92	93	94	95						Loka POM di Kabupaten Belitung
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Loka POM di Kabupaten Belitung	79	80	81	82	83						Loka POM di Kabupaten Belitung
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Belitung	94	95	96	97	98						Loka POM di Kabupaten Belitung
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Belitung	91	92	93	94	95						Loka POM di Kabupaten Belitung
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Belitung	95	95,7 5	96,5	97.2 5	98						Loka POM di Kabupaten Belitung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Belitung	91	92	93	94	95						Loka POM di Kabupaten Belitung
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Belitung	91	92,2	93.40	94,6	95,8						Loka POM di Kabupaten Belitung
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Belitung	90	91	92	93	94						Loka POM di Kabupaten Belitung
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Loka POM di Kabupaten Belitung	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Belitung
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM di Kabupaten Belitung	18	19	20	21	22						Loka POM di Kabupaten Belitung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Loka POM di Kabupaten Belitung	50	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Belitung
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Belitung	0	81	82	83	84						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Loka POM di Kabupaten Belitung	0	25	25	25	25						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Belitung	48	48	50	53	56						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Belitung	117	118	124	130	138						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Belitung	15	16	18	19	21						Loka POM di Kabupaten Belitung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Loka POM di Kabupaten Belitung	129	141	154	169	186						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Belitung	0	84	84	84	84						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Belitung	0	60	60	60	60						Loka POM di Kabupaten Belitung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi		Loka POM di Kabupaten Belitung											Loka POM di Kabupaten Belitung
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Belitung	50	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Belitung
	Meningkatnya efektivitas KIE		Loka POM di Kabupaten Belitung											Loka POM di Kabupaten Belitung
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Loka POM di Kabupaten Belitung	85,78	86,64	87,49	88,35	89,21						Loka POM di Kabupaten Belitung
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Loka POM di Kabupaten Belitung	2	3	4	5	6						Loka POM di Kabupaten Belitung
	3	Jumlah desa pangan aman	Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Belitung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Loka POM di Kabupaten Belitung	114	200	240	288	346						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Belitung	20	7	8	10	11						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Loka POM di Kabupaten Belitung	2	3	4	5	6						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 4: Desa Pangan Aman		Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Belitung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		Loka POM di Kabupaten Belitung											Loka POM di Kabupaten Belitung
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Loka POM di Kabupaten Belitung	13,79	31.03	51.72	75,86	100						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Belitung	4	5	6	7	7						Loka POM di Kabupaten Belitung
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Loka POM di Kabupaten Belitung											Loka POM di Kabupaten Belitung
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Loka POM di Kabupaten Belitung	91	92	93	94	95						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1	2						Loka POM di Kabupaten Belitung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Loka POM di Kabupaten Belitung											Loka POM di Kabupaten Belitung
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Belitung	90	91	92	93	94						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Belitung	14	14	15	15	15						Loka POM di Kabupaten Belitung
	Layanan Publik UPT yang prima		Loka POM di Kabupaten Belitung											Loka POM di Kabupaten Belitung
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Loka POM di Kabupaten Belitung	4,05	4,15	4,25	4,35	4,51						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Loka POM di Kabupaten Belitung	7	20	20	20	22						Loka POM di Kabupaten Belitung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Loka POM di Kabupaten Belitung											Loka POM di Kabupaten Belitung
	1	Nilai AKIP UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Belitung	75,7	76,7	77,7	78,7	80						Loka POM di Kabupaten Belitung
	2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Belitung	5	5	5	5	5						Loka POM di Kabupaten Belitung
	3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Loka POM di Kabupaten Belitung	2,9	3	3	3	3						Loka POM di Kabupaten Belitung
	4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Loka POM di Kabupaten Belitung	100	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Belitung

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi	Loka POM di Kabupaten Belitung	11	12	13	14	15						Loka POM di Kabupaten Belitung
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM		Loka POM di Kabupaten Belitung						1.992, 2	2.191, 4	2.410, 5	2.651, 6	2.916, 8	Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Belitung
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Loka POM di Kabupaten Belitung	1	1	1	1	1						Loka POM di Kabupaten Belitung

